PENGHEMATAN MELAWAN DEMOKRASI

Fase Otoriter Neoliberalisme?

Greg Albo dan Carlo Fanelli



Kata Pengantar:
Anto Sangaji

INDOPROGRESS

PENGHEMATAN MELAWAN DEMOKRASI
Fase Otoriter Neoliberalisme?

Greg Albo dan Carlo Fanelli

Kata Pengantar: Anto Sangaji

INDOPROGRESS



Judul asli: *Austerity Against Democracy An Authoritarian Phase of Neoliberalism?*
Pengarang: Greg Albo dan Carlo Fanelli
Penerjemah: Andre Barahamin dan Hizkia Yosie Polimpung
Editor: Hizkia Yosie Polimpung
Penerbit: IndoPROGRESS, 2015

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Anto Sangaji

PAHAM neoliberalisme tidak jatuh dari langit. Sebaliknya, doktrin ini lahir dari kondisi obyektif krisis kapitalisme. Oleh karena itu, percakapan mesti bertolak dari krisis di dalam sistem ini. Kapitalisme dan krisis merupakan dua sisi dari sekeping mata uang. Dalam sejarah hampir dua abad terakhir, sistem ini mengalami guncangan silih berganti. Sebelum 2008, krisis besar sudah berulang terjadi: 1820an, 1870an, 1930an, dan 1970an. Untuk memperpanjang nafas, sistem ini selalu berusaha keluar dari krisis dengan resep penghilang rasa sakit, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Marx menganggap ketidakstabilan kapitalisme bersifat endogen. Artinya, krisis bukan sesuatu yang bersumber dari luar, tetapi tertanam di dalam sistem ini. Kestabilan atau ketidakstabilan kapitalisme diukur dari tingkat keuntungan (*rate of profit*), yakni rasio nilai keuntungan terhadap nilai investasi kapital dalam periode tertentu. Rasio ini menjelaskan apakah investasi sukses, berjalan di tempat, atau jeblok. Krisis artinya jeblok, ditandai dengan gejala-gejala: investasi atau akumulasi kapital melambat atau merosot. Perusahaan-perusahaan besar memangkas jumlah tenaga kerja agar tetap bisa bertahan hidup. Perusahaan-perusahaan lebih kecil terpaksa tutup sama sekali dengan memecat semua buruhnya. Pengangguran merebak.

Di *Capital volume III*, Marx menjelaskan teori tentang krisis dengan berpangkal pada hukum tendensi kemerosotan tingkat keuntungan (*the law of the tendential fall in the rate of profit*, LTFRP). Dia bilang, penyebab kemerosotan tingkat keuntungan adalah karena terjadi peningkatan komposisi kapital organik (*organic composition of capital*): yakni, nilai kapital konstan (*value of constant capital*) tumbuh lebih cepat dari nilai kapital variabel (*value of variable capital*). Kapital konstan meliputi mesin, pabrik, bahan baku; sementara kapital variabel adalah upah plus benefit yang diterima kelas pekerja. Kita tahu, didorong oleh kompetisi, kapitalisme memiliki kecenderungan untuk terus-menerus mengadopsi teknik-teknik produksi lebih mutakhir yang hemat tenaga kerja (*labour-saving technology*) agar produktivitas meningkat. Belanja untuk penggunaan mesin-mesin terbaru yang lebih produktif menjadi keharusan, tetapi dalam waktu yang sama

memangkas jumlah pekerja, Inilah faktor mendasar yang menyebabkan terjadi kemerosotan tingat keuntungan yang kemudian bermuara pada krisis. Tetapi, Marx juga menjelaskan tentang kontra-tendensi (*counter-acting*) yang mencegah atau menunda krisis dalam waktu tertentu. Misalnya, untuk mencegah krisis, kelas kapitalis berusaha meningkatkan tingkat keuntungan, dengan meningkatkan tingkat eksploitasi terhadap buruh dan menekan belanja konstan kapital. Eksploitasi ditingkatkan, misalnya melalui perpanjangan jam kerja atau melipat-gandakan beban kerja tanpa mengubah upah buruh.

Beberapa ahli ekonomi-politik Marxis mencoba menguji validitas LTFRP dalam kasus-kasus krisis kapitalisme yang kerap berulang. Mengambil Amerika Serikat sebagai kasus, Andrew Kliman (2012) menunjukkan puncak tingkat keuntungan perusahaan-perusahaan di sana terjadi pada 1949 yang mencapai sekitar 45 persen, kemudian tendensinya terus merosot dalam 60 tahun kemudian, hingga mencapai di bawah 25 persen pada 2009. Kecenderungan sama juga terjadi di Eropa Barat. Dengan mengambil kasus Jerman, Perancis, dan Inggris, Duménil & Lévy (2004) menunjukkan terjadi trend kemerosotan tingkat keuntungan dalam periode 1965-1985. Dalam periode 1965-1974, tingkat keuntungan sekitar 18.6 persen, kemudian merosot menjadi 13.8 persen dalam periode 1975-1984. Kemerosotan tingkat keuntungan memperlambat akumulasi kapital dan mengakibatkan lonjakan pengangguran. Dalam periode yang sama, tingkat akumulasi merosot dari 4.8 persen (1965-1974) menjadi 2.3 persen (1975-1984). Sedangkan tingkat pengangguran meningkat dari 1.8 persen (1965-1974) menjadi 6.1 persen (1975-1984).

Dalam kerangka global, studi Michael Robert membuktikan validitas LTRPF yang menandai krisis panjang sistem ini. Menggunakan data dalam kurun waktu 1869-2007, Robert (2015) menunjukkan persentase rata-rata kemerosotan tingkat profit dari sekitar 40 persen pada 1869 menjadi sekitar 20 persen pada 2007. Dia juga membuktikan hubungan yang sangat kuat antara komposisi organik kapital dengan tingkat profit. Dalam periode yang panjang, 1946-2014, Robert menunjukkan secara global komposisi organik kapital meningkat 20 persen dan tingkat profit merosot 20 persen. Dalam periode yang lebih pendek, 1982-1997, tingkat keuntungan meningkat sebesar 13 persen dan komposisi organik kapital

merosot 16 persen. Sementara itu periode 1980-2014, di mana neoliberal-isme diterapkan, tingkat profit meningkat. Ini terjadi karena *counter acting*, yakni kelas kapitalis meningkatkan eksploitasi terhadap buruh dan menekan belanja untuk konstan kapital. Dalam periode ini, tingkat keuntungan naik, 2/3 berkat meningkat eksploitasi terhadap buruh dan hanya 1/3 karena menekan ongkos teknologi.

***

Berbeda dengan Marxisme, para penyokong kapitalisme melihat krisis kapitalisme dengan cara berbeda. Mereka menganggap sistem ini tidak bermasalah secara internal. Jika ada gejolak dalam sistem, problemnya bersifat parsial. Tidak heran, setiap krisis selalu diikuti dengan usaha untuk keluar dari krisis itu dengan solusi parsial. Hasilnya, krisis datang, pergi, dan datang lagi. Depresi Dahsyat (*Great Depression*) dunia 1930an bisa diselamatkan melalui Perang Dunia II. Selama dan sesudah perang, ekonomi Amerika Serikat mengalami pemulihan melalui campur tangan/intervensi negara yang sangat kuat. Negara memainkan peranan sentral dalam pemulihan ekonomi di negeri itu dengan membelanjakan uang secara besar-besaran. Akibatnya, produksi kembali normal dan keuntungan perusahaan kembali melimpah-ruah. Dan yang paling pokok, mayoritas kelas pekerja di jantung kapitalisme dunia ini memiliki kepastian untuk bekerja secara permanen. Mereka juga menikmati upah ril yang selalu meningkat. Negara juga membangun sistem perlindungan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan santunan kepada para penganggur. Juga, Depresi Dahsyat itu menelorkan pemikiran ekonomi baru. John Maynard Keynes, menulis buku *General Theory*, ketika krisis itu terjadi, lantas menjadi kitab suci. Dia menyerang para penganjur ekonomi klasik yang mempertuhankan kebebasan pasar. Dia menyarankan campur tangan pemerintah dalam ekonomi secara teratur, dengan menaikkan belanja pemerintah, pemotongan pajak, dan menurunkan tingkat suku bunga. Singkatnya, teori Keynes menjadi alternatif terhadap kegagalan liberalisme ekonomi dan memberikan pembenaran ilmiah terhadap campur tangan negara dalam ekonomi.

Dua dekade setelah sukses gemilang, krisis kembali datang. Pada 1970s, terjadi apa yang disebut dengan Deflasi Dahsyat (*Great Deflation*). Krisis

ini ditandai dengan inflasi besar-besaran, peningkatan jumlah pengangguran, kemerosotan nilai ril indeks pasar modal, dan kerontokan perusahaan-perusahaan dan bank-bank. Negara kembali hadir, tetapi dengan resep baru, 'neoliberalisme'. Campur tangan negara ala Keynes dianggap sebagai penyebab pasar tidak bekerja dengan efisien. Negara hanya parasit, seperti Adam Smith menyebut tentang negara merkantilis yang menghambat perdagangan bebas. Di Inggris, Perdana Menteri Margaret Thatcher mulai menghunus pedang perang terhadap serikat-serikat pekerja yang sangat kukuh dalam periode sebelumnya. Pasar tenaga kerja disulap menjadi lebih lentur sehingga menekan upah ril, menciptakan pengangguran, dan mendorong tumbuhnya pekerja-pekerja lepas. Negara mulai menarik diri dari sistem perlindungan sosial. Dan yang paling pokok, program-program privatisasi terhadap sektor-sektor pelayanan publik mulai digencarkan. Krisis juga melahirkan pundit neoliberalisme, yang terkenal adalah Milton Friedman. Pada awal 1960an, di bukunya yang terkenal *Capitalism and Freedom*, dia sudah mati-matian membela pasar bebas. Friedman bilang, penyebab terjadi Depresi Dahsyat 1930an bukan berasal dari ketidakstabilan internal dalam ekonomi kapitalis, tetapi karena salah urus pemerintah. Dia menolak campur tangan pemerintah yang besar. Baginya, peranan pemerintah seharusnya dibatasi pada soal-soal di mana pasar tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Negara cukup menentukan, memutuskan dan menegakkan aturan permainan. Aturan permaianan tentang pasar bebas.

Terang, dalam doktrin neoliberalsime, negara bukan tidak hadir. Negara justru benar-benar hadir. Negara harus memastikan pasar bekerja melalui serangkaian kebijakan konkrit. Negara memfasilitasi pasar bebas (*free market*) melalui deregulasi dan privatisasi; negara mempromosikan kebijakan-kebijakan perpajakan dan moneter, seperti reformasi perpajakan, pemotongan pengeluaran pemerintah (subsidi) untuk mengontrol inflasi dan membatasi intervensinya dalam pasar; negara melakukan liberalisasi impor dan melakukan devaluasi terhadap nilai tukar mata uang, mempromosikan spesialisasi (pada komoditi tertentu) menurut keunggulan komparatif, merangsang ekspor dan meningkatkan kompetisi di pasar domestik; negara mendorong liberalisasi arus modal (*capital flows*) untuk menarik investasi asing dan meningkatkan kemampuan domestik di dalam konsumsi dan investasi; negara melakukan liberalisasi sistem keuangan nasional untuk meningkatkan simpanan dan tingkat pengembalian

investasi; negara mempromosikan fleksibilitas pasar tenaga kerja untuk meningkatkan kesempatan kerja; negara memperbaiki sistem hukum dalam rangka menciptakan atau melindungi hak-hak milik; negara mengembangkan demokrasi politik, bukan dalam rangka melindungi kemerdekaan atau kebebasan dan hak-hak asasi manusia, tetapi terutama untuk melemahkan kemampuan mayoritas rakyat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi. Albo & Fanelli (2014:7) merangkum pengertian negara dalam sistem neoliberalisme sebagai berikut:

> [N]eoliberalism as a political practice should not be read as a juxtaposition of (less) state against (more) market. As a set of policy practices, neoliberalism has been about a particular kind of state suited to the logic of capital in a specific historical phase of capitalist development. As such, it has been directed at reducing public services and assets in order to open-up the state sector to new profit-making opportunities; lowering wages, benefits and working conditions for a more flexible and market-dependent workforce; and deploying the coercive capacities of the state to enforce these 'market measures.

Dalam konteks semacam ini, kita perlu membaca pamflet Greg Albo & Carlo Fanelli ini. Jika ada hal yang baru dari pamflet ini, maka saya mencatat bahwa keduanya mengingatkan kita tentang sifat lebih progresif dari proyek neoliberalisme kini. Terutama setelah Depresi 2008-2010, neoliberalisme muncul lebih ganas. Albo & Fanelli menyebut dua karakter yang menonjol dari fase neoliberalisme saat ini: '*total privatization*' dan '*disciplining dissent*'. Dalam rangka menekan rasio utang pemerintah terhadap GDP, agenda total privatisasi atau komodifikasi terhadap sektor-sektor pelayanan publik, kini semakin digencarkan mengikuti privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara yang terjadi pada 1980an dan 1990an. Dengan mengajukan konteks terutama di negeri-negeri kapitalis maju, Albo & Fanelli mengisyaratkan bahwa penerapan neoliberalisme benar-benar membebani kelas pekerja. Mereka dipaksa untuk membayar beban dari krisis demi kejayaan kelas kapitalis. Negara bertindak lebih otoriter untuk melindungi sistem ini, dengan mendisiplinkan para penentangnya, terutama kelas pekerja agar tidak bergolak. Substansi demokrasi, yakni

peluang bagi kelas-kelas dalam masyarakat untuk memperjuangkan alternatif tatanan sosial yang lebih baik dijungkir-balikkan. Negara neoliberal mengusung 'disciplinary democracy', yang tak lain adalah subordinasi demokrasi kepada pasar. Jangan heran, di bawah neoliberalisme, demokrasi jadi hanya berwatak prosedural.

Kalau sepakat dengan pendapat Albo & Fanelli tentang negara dalam doktrin neoliberalisme yang selalu menyeleraskan dirinya dengan logika kapital, maka masih kah kita mempercayai doktrin bahwa dalam masyarakat kapitalis, negara bersifat netral? Tidak ke sana, tidak ke sini, tetapi di tengah-tengah? Perkembangan kapitalisme mutakhir melalui neoliberalisme, terutama di negeri-negeri kapitalis maju seperti ditunjukkan Albo & Fanelli di pamphlet ini, semakin mengonfirmasi kebenaran Marx dan Engels sekitar 150 tahun lalu: "negara adalah sebuah komite/panitia yang mengurus kepentingan-kepentingan bersama keseluruhan kelas kapitalis". Atau, kata Engels di kesempatan lain: "negara adalah sebuah mesin kelas kapitalis [...] Negara dari kelas kapitalis, badan kolektif yang ideal dari keseluruhan kelas kapitalis".

Anto Sangaji *adalah Kandidat doktor di Departemen Geografi, York University, Toronto, Kanada*.

Daftar Pustaka

Albo, G. & Fanelli, C. N.D. "Austerity Against Democracy: An authoritarian phase of neoliberalism?" Center for Social Justice.

Duménil G. & Lévy, D. 2004. *The Capital Resurgent: Roots of the neoliberal revolution*. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.

Engels, F. 1998[1877]. *Anti-Duhring*, CD-Rom. London: Electric Books.

Friedman, M. 1962. *Capitalism and Freedom*. Chicago and London: University of Chicago.

Keynes, J.M. 2007 [1936]. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Palgrave MacMillan.

Kliman, A. 2012.*The Failure of Capitalist Production: Underlying causes of the great recession*. London: Pluto Press.

Marx, K. and Engels, F. 1998[1848]. *The Communist Manifesto*, Cd-Rom. London: The Electric Book Company.

Marx, K. 1981 [1863-1883]. *Capital volume III*. London & New York: Penguin Books.

Saad-Filho, A. & Johnston, D. (eds.) (2005). *Neoliberalism: A critical reader*. London: Pluto Press.

Robert, M. 2015. "It's a Depression". A paper presented on 28 May, in London.

Smith, A. 1999 [1776]. *The wealth of nations*. London: Penguin Books.

PENGHEMATAN MELAWAN DEMOKRASI
Fase Otoriter Neoliberalisme?

Greg Albo dan Carlo Fanelli

I. Neoliberalisme dan Penghematan

PRAKTEK neoliberalisme memiliki banyak sisi, menunjukkan variasi kelembagaan dan modalitas kebijakan alternatif di seluruh wilayah geografis dan dalam berbagai skala negara. Seluruh spektrum partai politik, kurang lebihnya, telah tersusun dalam pemerintahan neoliberalisme. Hal ini, dalam banyak hal, cukup mengejutkan. Asal-usul teori neoliberalisme dapat ditelusuri kembali ke tahun 1930an, di mana kelompok kecil intelektual liberal eksentrik bertemu di Paris untuk membahas tentang perang dan ancaman yang ditimbulkannya, yang menurut mereka, oleh 'totalitarianisme' dan 'perencanaan kolektivis' (Mirowski dan Plehwe, 2009). Kemunculan ide liberalisme 'baru' mereka merupakan penggabungan dari pemikiran ekonomi marginalis dari akhir abad ke-19 dengan filsafat politik di Eropa Barat dari akhir abad ke-18. Sejak awal, sebuah doktrin baru secara sadar telah diatur untuk menentang sosialisme sebagai tatanan ekonomi dan demokratik bagi kapitalisme dan juga bertindak sebagai pembela paling gigih dari lembaga-lembaga privat.

Secara spesifik, dalam mandat programatiknya, neoliberalisme merupakan turunan dari Depresi Besar (*Great Depression*) dan didesain untuk mencegah intervensi negara ala Keynesian. Meski tampak sebagai orang luar, neoliberalisme bukanlah doktrin politik asing bagi elit-elit ekonomi dan politik di Eropa Barat dan Amerika Utara: di mana ide-ide neoliberal selalu dimasukkan sebagai komponen legal dalam setiap pembahasan kebijakan negara, khususnya di Jerman, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Jamie Peck (2008, halaman 3-4) menyatakan bahwa, "[Neoliberalisme] melintasi negara, reaksioner, dan hibrida yang berantakan sejak awal Hal ini merupakan upaya untuk menyusun dan membangun (tatanan) pasar,

sesuatu yang terus-menerus direkonstruksi melalui praktik."

Para ekspositor utama neoliberalisme kontemporer memiliki tujuan menciptakan liberalisme dalam pengertiannya sebagai kapitalisme yang cocok di segala zaman. Hal ini dicontohkan dengan baik dalam teori ekonomi dan politik, dalam tulisan-tulisan Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, dan Milton Friedman. Von Mises, tentu saja, adalah tokoh sentral ekonomi Austria yang merupakan penentang Marxisme dan terkanal dengan upayanya melawan intervensi negara di dalam pasar (termasuk menyetujui fasisme Italia untuk menghancurkan politik sayap kiri). Perpindahan von Mises ke Amerika Serikat di masa perang merupakan langkah penting yang menjadi awal kelahiran para pemikir neoliberal di kedua sisi Atlantik. Tapi Hayek-lah dan "*The Road to Serfdom*"-nya pada tahun 1944 yang dengan baik memberi contoh tujuan-tujuan politik neoliberalisme, dan pandangan kontroversialnya tentang kebebasan pasar yang merupakan prasyarat penting untuk melahirkan kebebasan demokratis di mana "hanya kapitalisme yang membuat demokrasi menjadi mungkin" (1976, halaman 69-70). Bagi Hayek, demokrasi dipahami terutama dalam pengertian prosedural sebagai "demokrasi liberal dengan konstitusional-terbatas" yang dapat menjadi pelindung dari potensi pasar yang dapat "menyalahgunakan demokrasi" (Farrant, McPhail, and Berger, 2012, halaman 516). Dalam hal ini, Hayek dikenal mengikuti pemikiran von Mises dalam preferensinya untuk 'diktator liberal' menuju 'pemerintahan demokratik yang kurang liberalisme-nya'. Hayek percaya bahwa ide-ide tersebut secara perlahan meresap ke dalam kesadaran dan kebijakan publik. Tahapan perubahan intelektual dan kebijakan, bersama-sama, bisa bertranformasi secara sistematis. Setelah Perang Dunia II, pemikiran neoliberal semakin dilembagakan, terutama dengan pembentukan Komunitas Mont Pelerin pada tahun 1947, yang secara perlahan membawa ordoliberal Jerman, intelektual Inggris dari London School of Economics (tempat di mana Hayek berada) dan University of Manchester, para pengikut dari Austrian School of Economics, serta ekonom neoklasik Amerika dari Chicago School dan Virginia School (Stedman Jones, 2012).

Neoliberalisme kemudian pada masa pasca perang dipelihara melalui pendanaan oleh lembaga-lembaga seperti Institute of Economic di London dan Heritage Foundation di Washington, Fraser Institute di Vancouver,

dan masih banyak lagi. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya menjaga aliran konstan kebijakan dan konferensi, mereka juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan kurikulum universitas dan praktik perekrutan, terutama di bidang ekonomi, namun secara perlahan menjalar di seluruh 'pusat-kebijakan' disiplin ilmu (Mirowski dan Plehwe, 2009). Pertumbuhan lembaga-lembaga pemikir (*think tanks*) neoliberal dan pengaruhnya di kalangan akademisi dan para pembuat kebijakan membentuk kembali kontur advokasi kebijakan publik, yang pada awalnya diawali para aktivis intelektual dan di kemudian hari para politisi, secara perlahan merebut posisi-posisi penting dalam kesadaran publik. "Kampanye persuasif yang permanen" ini, seperti yang disebutkan oleh Konzolanka (2007, halaman 7), berusaha untuk menangkap imajinasi publik, melegitimasi kebijakan neoliberal dalam wacana kebijakan dan, pada akhirnya, memperoleh tempat dalam praktik negara.

Setelah demam paska perang (dunia), neoliberal terbukti tidak kenal lelah mengkritik negara -dan terutama sosial – terkait pengeluaran yang berlebihan dan tak terjangkau pada masa pasca perang. Secara khusus serikat pekerja yang lalu dikecam oleh politisi, sektor bisnis dan pakar media, sebagai hal yang tidak produktif dan tidak kompetitif. Kebebasan pasar kemudian dipahami sebagai hal yang memerlukan kekuatan yang terpusat pada negara. Pandangan-pandangan ini dijadikan norma (seperti memang yang menjadi tujuan) di buku "*Capitalism and Freedom*" karangan Milton Friedman pada tahun 1962. Di sini kebebasan ekonomi yang tidak terbatas dipandang sebagai tujuan akhir kebebasan politik: "Sejarah telah menunjukkan bahwa hanya kapitalisme-lah kondisi yang diperlukan untuk kebebasan berpolitik" (Friedman, 2002, halaman 17). Seperti juga Hayek, kebebasan harus bergantung pada kebebasan pasar dan kepemilikan pribadi, dan demokrasi dipahami hampir secara eksklusif hanya seputar hal formal dan prosedural.

Karakter spesifik dari hubungan sosial kapitalis dan demokrasi liberal secara historis terpinggirkan oleh teori neoliberal dari posisi awalnya sebagai fokus utama, dan kecenderungan universalisasi pertukaran pasar dan kepemilikan pribadi kemudian menjadi hak istimewa dalam kenyataan ruang kebebasan manusia. Inilah sebabnya, dalam pandangan kami, praktik politik neoliberalisme tidak harus dipahami sebagai usaha juktaposisi

(minimalisasi) negara terhadap (maksimalisasi) pasar. Sebagai seperangkat praktik kebijakan, neoliberalisme merupakan jenis khusus dari kondisi negara yang disesuaikan dengan logika modal dalam fase sejarah khusus perkembangan kapitalis. Itu mengapa, neoliberalisme diarahkan pada pengurangan aset dan layanan publik dalam rangka membuka peluang di sektor-sektor negara guna penciptaan sumber keuntungan yang baru; menurunkan upah, tunjangan, dan kondisi kerja untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih fleksibel dan bergantung pada pasar; dan memberlalukan pendekatan koersif oleh negara untuk menjalankan 'undang-undang pasar'. Politik penghematan yang muncul dari Depresi Besar pada 2008-2010 mengambil langkah lanjut menuju 'privatisasi total' sektor publik. Hal ini diikuti oleh 'disiplin ilmu demokrasi' yang semakin menyebarkan langkah-langkah anti-demokrasi yang memarginalisasi, dan bahkan mengkriminalisasi, perbedaan pendapat dalam usahanya untuk membela penghematan dan kebebasan pasar. Semakin sulit untuk membayangkan 'kapitalisme yang demokratis' yang digambarkan sebagai demokrasi sosial, bahkan bagi para pakar teori terkemuka saat ini, sebagai sebuah alternatif yang layak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tanpa memberikan jawaban-jawaban nyata terhadap prospek untuk kemunculan kembali demokrasi radikal sosialisme sebagai bendera di mana kelompok oposisi politik penentang neoliberalisme dan kapitalisme, terorganisir.

II. Perumusan Kebijakan Neoliberal

Pada akhir 1960an neoliberalisme telah muncul, baik sebagai kesatuan ide maupun gerakan politik yang dapat dengan mudah dikenali. Krisis pada tahun 1970an berakar pada melemahnya kapital berhadap-hadapan dengan tenaga kerja di tengah menurunnya marjin keuntungan yang mengarah pada peningkatan pengangguran dan inflasi. Selain itu, runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, mengakhiri penukaran emas dengan dollar Amerika dan yang disusul jatuhnya suku bunga fleksibel yang mendorong arus modal internasional. Perubahan-perubahan ini berlangsung dalam hubungannya dengan pembangunan kembali kapasitas produktif di Eropa dan Jepang, embargo minyak pada tahun 1973 di Arab, pemindahan kapital ke daerah industri baru yang memiliki tenaga kerja murah dan standar lingkungan yang lebih rendah, serta restrukturisasi teknologi dan organisasi pusat-pusat manufaktur di Amerika Utara dan Eropa Tengah (Harvey, 2005; Panitch dan Gindin, 2012).

Pada 1980an, di saat batas-batas kebijakan Keynesian menjadi semakin jelas terkait ketidakmampuannya untuk mengatasi kebuntuan ekonomi, neoliberalisme menawarkan kebijakan alternatif untuk mengatasi stagflasi beserta sebuah praktik politik yang dengan tegas menentang kemunculan tuntutan demokrasi dan anti-kapitalis. Eksperimen kebijakan-kebijakan neoliberal memiliki teladan, secara khusus dapat dilihat melalui junta militer Chili pimpinan Augusto Pinochet (yang dipuji oleh Hayek sebagai ‘transisi kediktatoran’ yang diperlukan). Namun perwujudan politik neoliberal sebagai proyek pemerintahan alternatif diwakili oleh terpilihnya Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat dan pada masa periode kekuasan mereka pada 1980an.

Selama lebih dari dua dekade berikutnya, neoliberalisme tidak hanya dominan melainkan juga tampak tidak terbantahkan sebagai visi yang menuntun ‘ekonomi pasar’ demokratis. Meskipun memiliki beberapa perbedaan, sekolah ekonomi Austria dan Chicago sepakat bahwa intervensi pemerintah ke dalam perekonomian menghambat pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, melanggar hak kepemilikan pribadi, dan, dengan demikian, merusak dasar kebebasan-kebebasan demokratis. Pasar, bagi Friedman dan Hayek, pada dasarnya cenderung ke arah penye-

imbangan dan kemerosotan ekonomi yang sangat parah merupakan hasil dari kesalahan kebijakan pemerintah. Upaya-upaya pemerintah untuk menjamin hak sosial warganya seperti kesehatan, pendidikan, dana pensiun, dan sebagainya, merupakan pelanggaran terhadap pilihan dan kebebasan individual. Para pendukung neoliberalisme menegaskan bahwa negara harus dibatasi untuk mengamankan prasyarat institusional bagi pasar yang kompetitif dan, setelah terbentuk, menyetak praktik negara untuk menjamin aturan pasar. Dengan demikian, neoliberal mengusulkan bahwa negara harus dibatasi untuk melindungi hak milik pribadi, keamanan, pertahanan nasional, dan penegakan hukum berbasis kontrak sehingga memungkinkan pasar untuk memaksakan kondisi yang paling menguntungkan bagi akumulasi (Milonakis dan Fine, 2009).

Visi sosial ini diterjemahkan ke dalam inti programatik dari matriks kebijakan neoliberal: fokus kebijakan ekonomi pada pengendalian inflasi dan insentif penawaran; privatisasi dan komersialisasi aset dan jasa sektor publik; liberalisasi perdagangan barang dan pergerakan modal; restrukturisasi peraturan ketenaga-kerjaan (dan bisnis) untuk mengurangi 'hambatan' pasar; dan komodifikasi sosial dari barang dan jasa (Birch dan Mykhnenko, 2010). Di sekitar sektor kebijakan ini, sejumlah negara berinisiatif untuk mengikuti —seperti yang dijelaskan di bawah— perubahan bentuk sosial negara menjadi seperangkat institusi dan mekanisme kebijakan yang mendukung disiplin ilmu pasar.

Dalam hal kebijakan ekonomi, neoliberal menuju ke arah untuk menjaga kenaikan upah riil sembari tetap meletakkannya di bawah azas peningkatan produktivitas, terapi kejut moneter yang diikuti target-inflasi oleh bank sentral, reformasi pajak regresif, hambatan pada pertumbuhan layanan sosial, strategi pertumbuhan dengan mengandalkan ekspor, meniadakan kontrol pada investasi langsung dari pihak asing, dan liberalisasi perdagangan. Dalam pengertian kebijakan kesejahteraan, etos tanggung jawab pribadi dan kesalahan individu kemudian dilengkapi oleh amal, filantropi, dan kesukarelaan yang akan diprioritaskan di dalam program sosial yang dikelola negara (Peck, 2010).

Transformasi sektor publik dikaitkan dengan penerapan teori 'manajemen publik baru', yang dibangun di sekitar tesis-tesis Virginia School

dalam upaya bagaimana mengubah negara menjadi serangkaian pasar internal. Teori ini menegaskan "bahwa pemerintah, dan yang lebih luas, sektor publik harus berfungsi layaknya sektor privat dan harus menjadikan pasar sebagai inspirasi dan, bila memungkinkan, menirunya" (Shields dan Evans, 1998, halaman 56). Sesuatu berbentuk manual kebijakan yang tampil untuk manajemen sektor publik: privatisasi barang dan layanan jasa publik; ketergantungan terhadap outsourcing dan kontrak; komersialisasi layanan negara seperti ketentuan user-pay dan monetisasi aset publik; dan persaingan antara lembaga-lembaga publik, penggunaan tenaga kerja kontrak dalam jangka pendek. Dalam negara "berkecenderungan" neoliberal, privatisasi dan komersialisasi layanan publik telah merampas setiap mekanisme perlawanan — kantor ombudsman, kebebasan informasi, partisipasi masyarakat dan panel peninjau, bentuk-bentuk baru demokrasi, dan sebagainya — untuk akuntabilitas demokratis dan ketentuan-ketentuan sosial.

Liberalisasi perdagangan dan arus modal berarti aransemen kembali lembaga-lembaga seperti Bretton Woods dan GATT kemudian menempatkannya, melalui inisiatif kebijakan terpadu dan kebetulan, di dalam matriks pemerintahan internasional baru di seluruh pasar dunia. Ini adalah proyek pendisiplinan 'wilayah-wilayah selatan' untuk menghentikan proyek-proyek nasionalis dari industri substitusi impor, dan untuk memfasilitasi transisi zona bekas Blok Timur dan China, Vietnam dan lainnya ke dalam kapitalisme. Tujuan-tujuan dari kebijakan — yang disebut 'Washington Consensus' — ini dilembagakan melalui berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Prinsip bantuan pinjaman memberikan lembaga-lembaga ini peran ganda: di satu sisi menyalurkan pinjaman, hibah, dan bantuan keuangan melalui "Structural Adjustment Loans and Programs"; dan, di sisi lain, pemberian pinjaman sebagai strategi untuk menghilangkan kebijakan 'yang menghambat pasar' dan mengadaptasi lingkungan kebijakan neoliberal (Van Waeyenberge, 2010). Program-program penyesuaian struktural biasanya dikodifikasikan ke dalam dokumen yang kemudian dijabarkan ke dalam ratusan halaman yang berisi perubahan kebijakan, seperti privatisasi layanan jasa dan aset milik negara, pemotongan fiskal, moneter, target inflasi dan suku bunga, dan liberalisasi neraca modal. Akibatnya, parlemen-parlemen nasional dan eksekutif

'didisiplinkan' untuk mengikuti kebijakan neoliberal. Kebanyakan ragam 'perjanjian perdagangan bebas' bilateral dan regional mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi dan perlindungan hak milik pribadi, terutama dalam bentuk investasi langsung dari pihak asing, melalui klausul-klausul hak investasi dan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan. Kerangka pemerintahan internasional, dengan kata lain, dengan jaringannya yang rumit dari administrator eksternal, struktur hukum, dan kerangka perjanjian yang dipimpin oleh negara-negara inti pendukung kapitalisme, menjadi mekanisme pendisiplinan dalam pengambilan keputusan yang demokratis dalam mendukung pasar dunia.

Sepanjang tahun 1990an, hubungan kerja kembali digunakan untuk mengekspos para pekerja ke dalam 'kekuatan pasar'. Seperti pendapat Standing (1999, halaman 42) bahwa tindakan ini didesain untuk "melemahkan aturan perlindungan, membatasi lembaga kolektif, dan memperkuat aturan-aturan pro-individualistik". Apa yang disebut sebagai pengaturan 'yang fleksibel' telah meningkatkan penggunaan sistem kerja paruh-waktu, kontrak jangka pendek, percepatan tempat kerja, jam kerja malam hari dan lembur, tenaga kerja paruh waktu, waktu kerja di akhir pekan, rotasi dan pembagian jadwal kerja, jadwal yang berubah-ubah, serta pekerjaan kasar dan musiman. Mekanisme-mekanisme pendisiplinan pasar ini meningkatkan kecepatan kerja, menyebabkan tumbuhnya ketidak-pastian masa kerja, dan peningkatan stress dan konflik dalam pekerjaan karena jam kerja yang panjang dan kurangnya kontrol tentang waktu kerja (Vosko, 2006).

Penataan ulang kerangka regulasi negara dan level-level administratif memiliki tujuan untuk membatasi lingkup kebijaksanaan nasional dalam mengubah distribusi penawaran, hak milik, dan hasil pasar melalui intervensi negara. Hal ini sering tampak sebagai serangan terhadap negara oleh pasar. Tapi hal ini justru merupakan kesalahan pembacaan fundamental. Hal tersebut membentuk kembali fungsi negara melalui pemindahan tanggung jawab regulasi kepada badan-badan internasional – sebuah proses 'internasionalisasi negara' melalui fungsi regulasi khusus — untuk menyusun kerangka pasar nasional; dan pelimpahan tanggung jawab operasional secara simultan, terutama dari negara kesejahteraan ke bentuk pemerintahan daerah – melalui 'lokalisasi negara' bagi kebijakan dan

pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing — tanpa harus melakukan penyesuaian dukungan fiskal (Streeck dan Thelen, 2005; Brenner dan Theodore, 2002). Restrukturisasi neoliberal dalam negara tidak hanya menghadirkan halangan bagi pemerintahan progresif untuk menggunakan otoritas demokrasi nasional mereka dalam upaya melanjutkan kebijakan-kebijakan 'untuk melepaskan diri dari pasar', melainkan juga menelurkan peraturan internal yang dinamis bagi neoliberalisme di dalam dan antar pemerintahan. Dengan kata lain, persaingan antar-yurisdiksional terkurung dalam neoliberalisasi — 'tidak ada alternatif'. Ini berarti gangguan komodifikasi secara terus-menerus di semua bidang dalam kehidupan harian — 'hak kota', dalam arti tertentu, kemudian didefinisikan sebagai pengalaman hidup harian dalam kerangka kebebasan neoliberal dari 'hak pasar'.

III. Neoliberalsime Otoritarian: Sebuah Fase Baru?

Periode neoliberal dikaitkan dengan proses-proses finansialisasi. Hal ini mengacu pada peran sektor keuangan dalam kegiatan ekonomi dan peningkatan kedudukan bank sentral dan kebijakan moneter di cabang-cabang kebijakan ekonomi negara. Hal ini juga berarti bahwa pembangunan ekonomi semakin 'dipimpin oleh sektor keuangan' melalui ekspansi pasar kredit, peran sektor keuangan dalam struktur dan pengambilan keputusan perusahaan secara keseluruhan, ekspansi luas turunan dan pasar sekunder lainnya secara besar-besaran, dan bahkan peranan kredit dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kepentingan sektor keuangan, dan juga sentralitasnya, dalam aliansi politik modal telah diterjemahkan ke tempat yang lebih menentukan dalam struktur kekuasaan negara dan perannya dalam pembentukan kebijakan pemerintah (Albo, Gindin, dan Panitch, 2010).

Dalam pengertian ini, munculnya bank-bank sentral dalam kebijakan pada awal fase neoliberalisme merupakan basis bagi 'terapi kejut' yang digunakan untuk melawan inflasi. Tapi itu juga berarti, desain dan juga konsekuensi yang tidak diinginkan, bahwa kekayaan dan pendapatan kreditor (yaitu, sektor keuangan) akan tumbuh secara relatif ke sektor lainnya; deregulasi perbankan akan meningkatkan masalah dari pengaruh yang berlebihan dan resiko sistemik dari kegagalan bank; internasionalisasi modal akan digerakkan oleh sektor keuangan; dan pengaturan hutang negara akan menjadi semakin terikat dengan pasar obligasi. Sektor keuangan, oleh karena itu, telah menduduki peran yang lebih penting sebagai agen utama untuk mengatur alokasi surplus modal dan kredit di antara para pengguna potensial dan dengan demikian mendisplinkan industri. Dengan pergeseran tata administrasi hutang publik, sektor keuangan tidak hanya mencapai pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan negara melalui penyediaan dan pengawasan kredit dan hutang negara dalam bentuk pinjaman dan jaminan. Sektor keuangan juga mencapai posisi untuk menjaga tekanan yang berkelanjutan pada negara dalam proyek privatisasi dan komodifikasi sektor publik.

Sesungguhnya, finansialisasi yang kemudian disertai ketidak-menentuan sektor keuangan dan krisis kredit memang menjadi salah satu fitur

yang membedakan neoliberalisme. Namun setiap krisis keuangan, secara mengejutkan, sedari “Volcker Shock” di awal 1980an, memperkuat dan bukannya merusak posisi bank sentral, kredit dan sektor keuangan di bidang ekonomi, dan modal finansial dalam struktur negara dan kekuasaan. Dinamika ini mencapai puncaknya pada tahun 2008 dengan ledakan krisis keuangan global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya (Panitch, Albo, dan Chibber, 2010).

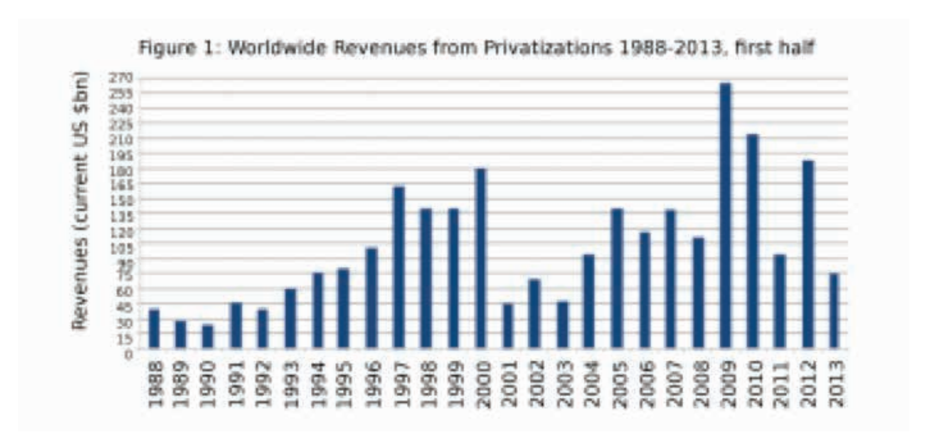
Apa yang awalnya berupa serangkaian hipotek gagal yang terisolir dalam kantong-kantong ekonomi Amerika Serikat pada musim gugur 2007, akhirnya mengarah pada kebangkrutan beberapa pemberi pinjaman berisiko tinggi, dan berubah menjadi krisis likuiditas sejumlah bank-bank besar dan pasar keuangan. Dari situ, krisis meledak menjadi permasalahan ekonomi global berupa kebangkrutan berbagai macam lembaga keuangan yang berpengaruh lebih jauh lagi. Krisis keuangan dengan cepat bermutasi menjadi krisis ekonomi global pada tahun 2009, karena kredit macet hipotek Amerika Serikat yang memicu krisis yang ditemukan dalam portofolio bank dan dana pinjaman di seluruh dunia. Semua negara utama (penyokong kapitalisme) segera terkena dampaknya dalam sistem perbankan nasional dengan terungkapnya area ‘risiko sistemik’ dalam sistem mereka.

Negara-negara yang tergabung dalam G8/G20, dikoordinasikan oleh bank sentral melalui perluasan kekuatan operasional yang semakin besar, melakukan intervensi dalam bentuk pinjaman triliunan untuk menjamin penyaluran kredit antar bank dan pembelian surat berharga pemerintah dan komersial. Dalam upaya untuk menghindari depresi global, G8/G20 menyelaraskan penurunan suku bunga dan berbagai penambahan ‘metode backstop’ terhadap pasar uang dan berkomitmen untuk menjaga keterbukaan pasar internasional untuk mencegah berubahnya kekhawatiran menjadi proteksionisme. Selain itu, di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2008-2010, serangkaian penggabungan bank, kuasi-nasionalisasi, dana talangan oleh sektor publik mengakibatkan ‘aset-aset bermasalah’ kemudian dialihkan ke sektor negara dan ke dalam neraca bank sentral. Ini bukan disebabkan, karena begitu banyaknya kesalahan memahami kebijakan yang diterapkan, sebagai upaya untuk kembali kepada Keynesianisme dan negara kemudian bertindak melawan pasar yang tidak stabil dan tidak

terkendali. Hal ini adalah 'darurat monetarisme' yang sudah lama dirumuskan oleh banyak neoliberal sebagai bagian dari kebijakan yang diperlukan dalam kasus gejolak permintaan kebutuhan yang semakin parah yang diakibatkan oleh ketidak-stabilan di pasar keuangan yang kemudian menguras sarana pertukaran yang ada (khususnya Friedman sendiri, dan Ben Bernanke di Bank Sentral Amerika Serikat dan seorang ekonom neoliberal). Langkah-langkah stimulus tambahan melibatkan program-program seperti pekerjaan umum sementara, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, sebagai sarana efektif penunjang permintaan kebutuhan dan memperkuat konsumsi. Untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap tujuan-tujuannya, dan untuk meyakinkan kembali afinitas politik agar terus melanjutkan neoliberalisme, seluruh anggota G20 sepakat untuk lebih membuka pasar mereka terhadap kapital/modal, menjamin ketersediaan kredit, dan monetisasi aset publik.

Sejak 2012, ketika krisis ekonomi tidak lagi dalam bahaya yang tidak terkontrol, negara terus-menerus merekonstruksi — dan kemudian memperdalam — kombinasi kebijakan neoliberal. Kekuasaan eksekutif semakin diperkuat dengan mengorbankan parlemen yang seringkali berkedok 'pemerintahan teknis'. Agensi-agensi khusus ekonomi untuk menetapkan strategi restrukturisasi negara, juga, telah dibentuk, menjauhi baris departemen dan akuntabilitas parlemen, dan melaporkan langsung ke eksekutif negara. Bank-bank sentral juga diberikan otonomi operasional lebih lanjut dari setiap bentuk akuntabilitas demokratis untuk menyebarkan berbagai 'teknik' kebijakan moneter, seperti 'bank-bank yang buruk', 'hutang yang terabaikan', dan 'pelonggaran kuantitatif', untuk mengalihkan kewajiban bank ke sektor publik dan ke dalam neraca bank sentral. Dan dengan bermutasinya krisis kredit menjadi krisis hutang sepenuhnya, "konsolidasi fiskal" telah menjadi mandat operasional 'teknis' untuk pergeseran lebih lanjut dari beban pajak, mengurangi ketentuan kesejahteraan negara, mencari konsesi serikat, dan 'monetisasi' besar-besaran aset publik.Terkait kemungkinan periode panjang stagnasi dan strategi neoliberal untuk mengatasi hutang publik, negara-negara inti kapitalis kini memasuki fase 'penghematan permanen' (tema yang diulang oleh lembaga-lembaga internasional dengan menyarankan untuk penyelesain dampak krisis terhadap hutang pemerintahan dalam kurun waktu 10-20 tahun) (Albo dan Evans, 2010).

Ada dua fitur dalam fase neoliberalisme ini yang pantas dicermati lebih lanjut — proyek 'privatisasi total' dan kebijakan dari protes politik.



Gambar 1. Sumber: Barometer Privatisasi, 2012, halaman 3

Privatisasi Total: Keistimewaan kebebasan pasar berada di atas praktik demokrasi yang merupakan inti dari filsafat neoliberalisme. Proposisi ini diterjemahkan ke dalam strategi kebijakan ekonomi melalui privatisasi total dan komodifikasi sektor publik.1 Gelombang pertama privatisasi perusahaan milik negara (BUMN) di bawah mandat neoliberal berlangsung dari pertengahan 1980an hingga akhir 1990an. Hal ini diawali oleh Amerika Latin dan transisi ekonomi dari negara-negara bekas Uni Soviet (Tiongkok mengambil jalan yang berbeda dalam menghadapi kapitalisme pasar). Diperkirakan pada 1985-1999, lebih dari 8.000 aksi privatisasi dilakukan di seluruh dunia dengan nilai yang mencapai lebih dari $1,1 triliun. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa untuk setiap dollar hutang negara berkembang ke IMF pada 1980-1984, setengahnya dibayar melalui privatisasi BUMN selama rentang masa 15 tahun ke depan (Brune dll., 2004).2

1 Tidak ada database umum yang dapat diakses untuk menggambarkan privatisasi. Ini adalah katalog terbaik dari Barometer Privatisasi dan Bank Dunia-IMF, yang menjadi sandaran data ini.

2 Brune dan rekan-rekan penulisnya (2004, halaman 196) menunjukkan bahwa: "Pendapatan privatisasi melebihi $100 miliar (kurs dolar tahun 1985) di Italia, Jepang, dan Inggris, dan lebih dari $50 miliar di Australia, Brasil, dan Prancis. Terkait dengan GDPnya (Produk Domestik Bruto — PDB), lima pelaku privatisasi terbesar adalah Bo-

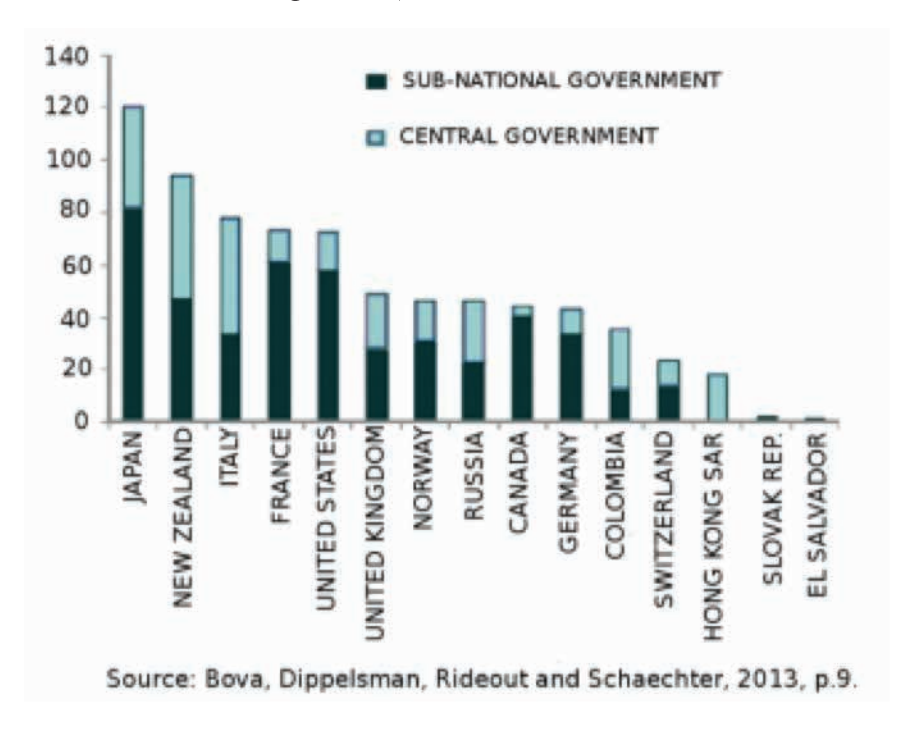
Setelah momentum privatisasi sedikit melambat di awal 2000an, proses tersebut kembali menguat karena banyak negara Eropa melikuidasi aset mereka selama pemulihan pasca-9/11 sebelum kemudian melambat lagi dengan terjadinya krisis keuangan pada tahun 2008, saat para pembeli bertambah sedikit dan semakin menjauh (lihat Gambar 1).

Namun proyek privatisasi total kini mendapatkan momentum baru. Menurut sebuah survey di "The Economist" (2014), salah satu media terdepan yang menyuarakan komodifikasi radikal sektor publik, tahun 2012 membawa volume privatisasi tertinggi ketiga berdasarkan nilai yang sudah dicatat, dengan perhitungan akhir untuk 2013 kemungkinan menyaingi tahun sebelumnya. Inggris, misalnya, baru-baru ini memprivatisasi Royal Mail dan ingin menjual aset lain seperti URENCO, spesialis dalam pengayaan uranium; Jepang ingin menjual Japan Post, yang diperkirakan bernilai $40 miliar; Australia telah mengisyaratkan adanya rencana untuk menjual aset layanan pos, sektor keuangan, dan penerbangan mereka; dan Prancis sedang mempertimbangkan melikuidasi investasi di Renault, Thales, dan Orange. Daftar singkat ini luar biasa (dan database yang ada begitu menakjubkan dalam kisaran privatisasi), dan mengindikasikan bahwa segala sesuatunya mungkin untuk dilakukan.

Ini hanyalah, saran *The Economist*, sebagai awal. Negara-negara mengambil penilaian secara keseluruhan dari 'aset-aset' dan 'kewajiban-kewajiban' sektor publik untuk membuat strategi jangka panjang privatisasi dan monetisasi (lihat Gambar 1). Pendekatan ini dibuat pada tahap awal krisis oleh perusahaan konsultan multinasional seperti KPMG (2009) sebagai upaya restrukturisasi yang diperlukan sektor publik untuk membayar krisis. Menurut OECD, 34 negara anggotanya memiliki saham mayoritas di lebih dari 2.000 BUMN dengan pekerja hampir enam juta orang dan bernilai $2,2 triliun. Jika ditambah dengan saham minoritas di perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara, jumlah tersebut meningkat dengan tambahan nilai hampir $900 milyar dan mencakup 2,9 juta pe-

livia, Guyana, Hungaria, Panama, dan Portugal, di mana mereka masing-masing telah menjual aset milik negara senilai lebih dari 30% dari GDP 1985 mereka pada tahun 1999. Pendapatan privatisasi melebihi 25% dari GDP 1985 di empat negara — Australia, Chili, Malaysia, dan Selandia Baru. Pada tahun 1999, total pendapatan privatisasi melebihi 5% dari GDP 1985 di 60 negara."

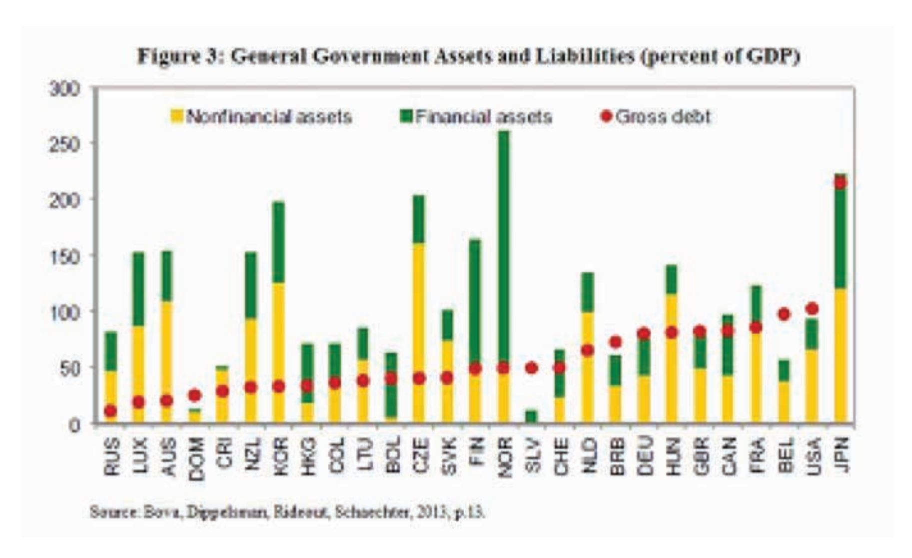
kerja lainnya. Gambar 2 menunjukkan, jika BUMN daerah diikut-sertakan maka nilai total meningkat menjadi lebih dari $4 triliun.



Gambar 2: BUMN pusat dan daerah (persentase GDP)

Dalam upaya untuk mengurangi hutang publik-terhadap-rasio GDP (lihat Gambar 3), negara menerapkan program likuidasi aset publik secara besar-besaran. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar total aset negara berada di atas tingkat hutang kotor/bruto dan dengan demikian hal tersebut tampaknya dikelola dengan cukup baik.

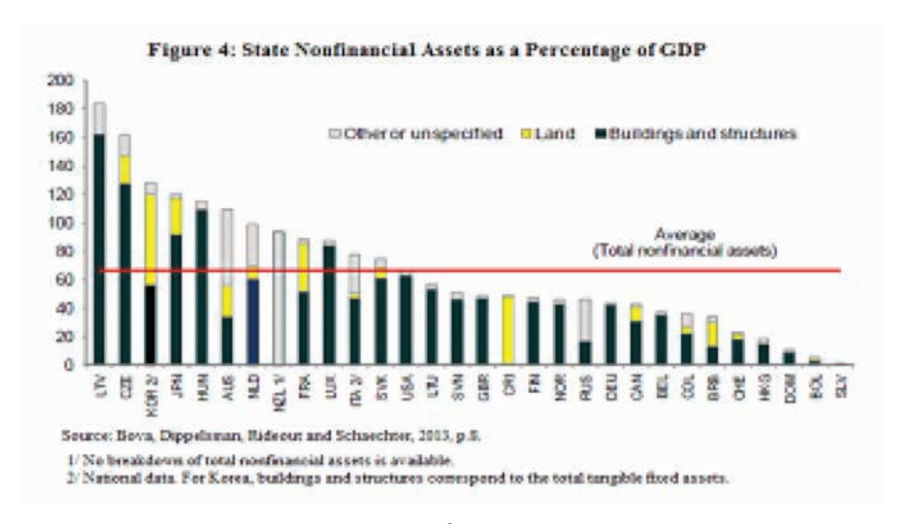
Gambar 4 menunjukkan adanya saham besar dari aset non-keuangan yang mungkin tersedia untuk privatisasi atau monetisasi di bawah berbagai modalitas administrasi neoliberal. *The Economist* (2014) melaporkan bahwa negara-negara OECD memiliki lebih dari $9 triliun di sektor tanah dan bangunan pemerintahan, kira-kira setara dengan 18 persen dari hutang kotor/bruto mereka.



Gambar 3.

Jika 'konsolidasi fiskal' adalah istilah teknis yang dijalankan sebagai pembenaran untuk proyek 'privatisasi total', maka ada beberapa petunjuk spesifiknya. Sebagai tanda reformasi kebijakan neoliberal kredibel untuk dapat bersanding dengan penerimaan dana talangan Uni Eropa dan dana penyesuaian struktural, misalnya, negara-negara seperti Polandia dan Yunani memprivatisasi berbagai aset dari layanan jasa hingga tanah, sumber daya, telekomunikasi, listrik, dan transportasi; Portugal memprivatisasi bandara, maskapai penerbangan nasional, galangan kapal, stasiun TV, dan lotre negara. Jika ini adalah contoh yang paling dramatis, maka mereka adalah tren umum di seluruh Eropa sebagai bagian dari kampanye penghematan yang baru (Privatization Barometer, 2012; TNI, 2013).

Reformasi manajemen sektor publik, dengan absennya privatisasi penuh, merupakan salah satu sumber restrukturisasi. OECD (2012; 2008), melalui program pemerintahan publiknya, telah secara aktif mendukung berbagai skema 'monetisasi' aset publik seperti kerjasama-publik-swasta, kesempatan sewa-menyewa, dan merumuskan anggaran dan norma-normal manajemen 'neoliberal' yang baru.



Gambar 4.

Petunjuk lain berasal dari pinjaman internasional dan pemerintahan-pemerintahan pusat di mana privatisasi merupakan syarat wajib dari pinjaman atau transfer antar-pemerintahan. Baik Uni Eropa maupun Bank Dunia, misalnya, telah secara agresif mendorong skema "P3s" (*public-private-partnerships* – kerjasama-publik-swasta) di area/sektor yang sulit secara tradisional untuk privatisasi sepenuhnya dengan menggunakan pengaruh fiskal. Area yang dimaksud di antaranya air, kesehatan, dan infrastruktur, serta transportasi, pendidikan, dana pensiun, dan inisiatif perubahan iklim (lihat IFC, 2014; Bortolotti dan Milella, 2006; Köthenbürger, dan Whalley, 2006). Di Chicago, penjualan alat "meteran parkir" pada tahun 2008 senilai $1,2 milyar dikritik sebagai keuntungan yang tidak memadai bagi negara untuk aset-aset yang telah dijual, sama halnya dengan penjualan Royal Mail, yang diperkirakan memiliki nilai sebesar $16 miliar, dan dijual hanya $6,5 miliar (Futrelle, 2012; Chorley, 2014). Tapi kerugian tersebut justru merupakan keuntungan bagi negara atau dampak 'konsolidasi fiskal' berbentuk keuntungan dalam kebebasan ekonomi, dengan neoliberal menyesuaikan pengaruh yang diperhitungkan.

Proyek 'privatisasi total' juga mendapatkan dukungan dan penguatan hukum melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional yang memasuki tahap baru. "Trans-Pacific Partnership" (TPP) yang ber-

tujuan untuk menghubungkan Amerika Utara dengan wilayah Asia-Pasifik, serta "Comprehensive Economic Trade Agreement" (CETA) antara Uni Eropa dan Kanada (Amerika Serikat dan Uni Eropa sekarang tengah merundingkan "Transatlantic Trade and Investment Partnership – TIPP) adalah dua contoh yang paling signifikan, masing-masing berbagi banyak sekali ketentuan seperti NAFTA (Arregui dan Roman, 2013; EPSU dll., 2010; Kelsey, 2011). Dalam dua kasus tersebut, persyaratan perjanjian cenderung menekankan untuk privatisasi dan komersialisasi aset dan layanan publik. Seperti yang diusulkan, perjanjian tersebut akan memberikan tekanan tambahan bagi aktivis kebijakan industri, dari perluasan produksi yang dipimpin oleh BUMN untuk mengatur persyaratan kinerja yang mewajibkan investor asing atau penyedia layanan untuk melakukan pembelian secara lokal, transfer teknologi, atau melatih pekerja lokal. Dampak gabungan dari aturan investasi, layanan, dan pembelian yang diusulkan juga tetap akan mempersulit pembalikan atas kegagalan privatisasi.

Pendisiplinan Perbedaan Pendapat: Dari asal-usul filosofisnya dalam antagonisme liberal kanan menuju sosialisme, neoliberalisme telah sepakat bahwa kendala dalam demokrasi mungkin diperlukan untuk mempertahankan pasar kapitalis. Kecenderungan 'de-demokratisasi' — beberapa menyebutnya 'paska-demokrasi' — sering diamati sebagai fitur utama dari praktik negara selama periode neoliberal. Sejak 2008, langkah-langkah 'otoriter' yang lebih terang-terangan yang memperpanjang perluasan pengamanan negara paska 9/11 dapat dideteksi. Ini bukanlah sebuah klaim bahwa 'polisi' atau negara 'terkecuali' telah memindahkan prosedur demokrasi liberal dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dengan mendesak peningkatan karakter plebisitarian dari pemilihan umum dan watak anti-demokrasi yang sekarang merasuki masyarakat politik.

Hal ini tercermin, misalnya, dalam kebangkitan politik sayap kanan dan penyebaran partai neo-fasis dan populis serta gerakan-gerakannya di Eropa dan Amerika Utara. Di Eropa, banyak sekali contohnya dan termasuk "National Front" di Prancis, "Party of Freedom" di Belanda, "True Finns" di Finlandia, "Northern League" di Italia, "Swiss People's Party" di Swiss, "Freedom Party" di Austria, "Progress Party" di Norwegia, "Danish People's Party" di Denmark, "National Democratic Party" di Jerman, "Jobbik" di Hungaria, "Golden Dawn" di Yunani, dan "UKIP" di Inggris. Meskipun

memiliki tingkat pemahaman sayap-kanan dan militansi nasionalis yang bervariasi, mereka disatukan oleh xenophobia anti-imigran dan sikap anti-Uni Eropa, serta konservatisme sosial, agama, dan fiskal ditambah dengan ketidak-percayaan yang mendalam terhadap lembaga-lembaga demokratis (Palmer, 2013; Higgins, 2013; Engelhart, 2013).

Di Amerika Utara, populisme kanan konservatif baru dapat ditemukan dalam gerakan “Tea Party” di Amerika Serikat serta sejumlah partai daerah seperti “Wildrose Alliance” di Kanada, yang kemunculannya dalam konteks bergesernya politik dari seluruh partai politik mainstream ke sayap kanan. Kekuatan-kekuatan sayap kanan tampak hadir di dalam “Republican Party” di Amerika Serikat dan pemerintahan “Conservative Party of Canada” di Kanada. Di Eropa dan Amerika Utara, partai-partai sayap kanan sering mendapatkan jumlah kursi yang signifikan dalam badan legislatif, dan mendapatkan persentase yang cukup besar dari suara rakyat. Penyebaran populisme sayap kanan telah menjadi sumber daya politik penting dalam akumulasi peningkatan kekuasaan negara untuk pengawasan dan pemaksaan serta pembatasan kesetaraan sipil dan kebebasan politik bagi seluruh warga negara.

Dalam keadaan genting di mana alternatif-alternatif sosial telah terpinggirkan, politik-politik ‘irasional’ sayap kanan memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Tapi keluhan-keluhan sosial yang dihasilkan oleh penghematan — meski banyak dibela oleh neoliberal sebagai pemulihan kebebasan pasar — juga telah disambut oleh resistensi politik. Sebuah upaya heroik yang baru-baru ini dilakukan oleh Ortiz dll. (2013) berupaya menangkap adanya pertumbuhan protes selama krisis. Mereka mendokumentasikan lebih dari 800 protes politik antara Januari 2006 dan Juli 2013 di 87 negara (mencakup sekitar 90 persen dari populasi dunia) (lihat Gambar 5).

Gambar 5: Jumlah protes di seluruh dunia berdasarkan Keluhan/Tuntutan Utama

Sumber: Ortiz, Burke, Berrada, dan Cortes, 2013, halaman 13

Selagi keadaan tidak merata, setiap tahun sejak krisis global, protes dan ketidak-puasan meningkat, khususnya di negara-negara inti kapitalis berpenghasilan tinggi, yang kemudian menyebar ke seluruh negara 'global selatan'. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi empat sektor keluhan: masalah yang berkaitan dengan keadilan ekonomi dan protes anti-penghematan yang berkaitan dengan menurunnya layanan publik, ketimpangan pendapatan, dan pekerjaan tidak tetap; kegagalan perwakilan dan sistem politik, seperti absennya demokrasi, keterlibatan korporat, dan pengawasan dan kebijakan pemerintah; keadilan global, yang meliputi kebijakan penyesuaian struktural IMF, kenaikan harga pangan, keadilan lingkungan, dan kepentingan global; dan hak-hak komunitas/masyarakat, seperti mengakhiri diskriminasi etnis-rasial, hak-hak masyarakat adat, kesetaraan perempuan, dan hak-hak kaum homoseksual. Mereka juga merekam hal-hal yang sering dikomentari dalam penilaian gerakan kiri dan krisis yang melandanya (Panitch, Albo, dan Chibber, 2012). Artinya

sejak resesi, gerakan protes memiliki tambahan tenaga dari golongan berpenghasilan menengah, tua dan muda, yang kemudian bergabung dengan serikat buruh dan kelompok-kelompok aktivis. Gerakan-gerakan protes tersebut juga telah memperpanjang pertunjukan mereka melalui berbagai taktik dan aksi langsung, termasuk, blokade, 'flash mob' di depan bank dan kantor pemerintahan, gerakan 'okupasi alun-alun kota', dan berbagai bentuk pembangkangan sipil lainnya. Selain itu, bentuk-bentuk baru dari 'para pengungkap aib (*whistle blowers*)' dan 'hacktivisme' komputer diarahkan untuk menyerang pemerintahan nasional, dan juga korporasi, lembaga-lembaga keuangan internasional, kebijakan pasar bebas, dan kekerasan negara.

Ini adalah jenis oposisi yang telah bertemu dengan 'pengerasan' negara dan karakterisasi dari fase baru dari 'otoritarian neoliberalisme'. Klaim ini didasarkan, sebagian, pada penguatan lebih lanjut dari kekuasaan eksekutif dan isolasi kebijakan ekonomi dari akuntabilitas parlemen yang kami sebutkan di atas. Tetapi ini juga muncul dari penggandaan luar biasa dari pembatasan legalisasi dan penertiban modalitas untuk mendisiplinkan perbedaan pendapat melalui 'langkah penghematan negara' (Eick dan Briken, 2014). Perkembangan ini terlalu luas dan beragam untuk dibuat daftarnya, tetapi mereka dapat diilustrasikan.

Dalam penelitian terbaru, LeBaron dan Dauvergne (2014) berpendapat bahwa pemerintah semakin menganggap protester, dan oposisi politik pada umumnya, sebagai ancaman bagi pemulihan dan daya saing ekonomi. Berbagai mekanisme untuk 'penertiban' — dan bahkan kriminalisasi — protes sedang diterapkan (Wood 2014). Negara, misalnya, menyusup ke dalam kelompok oposisi, seperti demonstran lingkungan dan protester Gerakan Okupasi, menghentikan pendanaan untuk organisasi-organisasi yang menuntut keadilan dan kesamaan, menutup ruang publik untuk protes, dan memperbesar denda dan tuntutan pidana untuk aksi-aksi protes 'ilegal'. Berbagai jenis pengawasan, kapasitas organisasional dan teknis yang dikembangkan dalam 'perang melawan terorisme' sekarang juga diterapkan dan digunakan untuk pengawasan domestik dan 'pasifikasi' terhadap aksi protes. Ini termasuk, tidak mengherankan, seluruh perangkat lunak untuk mengenali wajah, telepon, meretas komputer dan alat-alat elektronik, dan penggalian metadata. Penampilan formal demokrasi tetap

berada dalam 'pemilihan umum yang bebas' dan formalisme 'prosedur parlemen'. Namun kapasitas keamanan dan penertiban negara sedang disusun ulang dengan cara mengurangi kebebasan demokratis dan membatasi ledakan demokrasi populer yang muncul dalam aksi-aksi protes, gedung pertemuan dan tempat kerja. Richard Seymour (2013) secara sinis menunjukkan bahwa, di bawah kedok manajemen terhadap krisis, "negara mengasumsikan langkah-langkah untuk meningkatkan kontrol masyarakat pada saat mencoba untuk mengelola reorganisasi yang tidak populer dari layanan publik, kesejahteraan, dan hubungan pemilik modal-tenaga kerja."3

Dalam banyak kasus, langkah-langkah baru untuk menertibkan perbedaan pendapat memiliki dukungan legislatif dari berbagai latar belakang. Contohnya, "Bill H.R. 347", dibuat di tengah-tengah momen aksi Okupasi di Amerika Serikat pada tahun 2012, yang menegaskan bahwa "memasuki atau tinggal" di daerah yang dianggap "terbatas" sebagai aksi kejahatan. Undang-undang ini menguatkan aturan yang sebelumnya dan datang dari "National Defense Authorization Act" pada tahun 2012, yang memberikan presiden kekuasaan mutlak untuk memerintahkan penahanan kepada setiap orang di mana saja di seluruh penjuru dunia tanpa tuduhan atau pengadilan. Undang-undang ini membatasi akses ke bangunan atau kawasan yang dilindungi oleh Dinas Rahasia. Tidak hanya perlindungan untuk presiden Amerika Serikat saja, melainkan juga untuk politisi tinggi lainnya, pemimpin dan pejabat asing, dan termasuk acara-acara khusus yang dianggap penting (seringkali disarankan untuk menghalangi protes-protes di konvensi nasional "Democratic Party " dan "Republican Party", "Super Bowl", dan sebagainya). "Bill H.R. 347" mengkriminalisasi berbagai aksi protes, termasuk apa pun "yang menghambat atau mengganggu pelaksanaan ketertiban dari bisnis pemerintah atau acara-acara resmi" dan "menghalangi atau menghambat pintu masuk atau pintu keluar bangunan atau lapangan yang dianggap hanya bisa dimasuki kelompok tertentu" (Lennerd, 2012). Terlibat dalam perilaku tidak tertib atau meng-

---

3 Fokus kami di sini adalah pada undang-undang anti-protes nasional dan pengikisan hak-hak demokratis dan kebebasan. Hal ini penting untuk dicatat bahwa sejumlah pemerintah daerah, khususnya di tingkat negara bagian telah menerapkan undang-undang anti-protes, seperti juga beberapa universitas yang membatasi ekspresi politik dan perkumpulan mahasiswa.

ganggu kenyamanan publik — seperti aksi mogok pekerja sektor publik, demonstrasi politik, aksi protes, perkumpulan damai, dan okupasi ruang publik — juga bisa dikriminalisasi. Hukuman standar biasanya denda dan satu tahun kurungan penjara, sedangkan pelanggaran yang lebih serius dapat dihukum sepuluh tahun kurungan penjara. Meskipun tampaknya bertentangan dengan Amendemen Pertama konstitusi Amerika Serikat perihal kebebasan berpendapat dan berkumpul dalam aksi protes secara damai, undang-undang ini disahkan dengan dukungan dari kedua partai "Republican" dan "Democratic" (Camp, 2012).

Di Kanada, undang-undang anti-protes yang baru, kurang-lebihnya, merupakan respon langsung terhadap gerakan anti-penghematan. Pendahuluannya terletak pada ledakan protes pada Juni 2010 dalam pertemuan G8/G20 di Toronto, dan aksi mogok mahasiswa yang panjang dan militan di Quebec pada 2012. "Ombudsman Ontario" menyebut yang pertama sebagai "tindakan kompromi paling besar dari kebebasan sipil dalam sejarah Kanada", sedangkan yang kedua memperlihatkan implementasi "Bill 78" di Quebec, yang secara efektif melarang aksi mogok mahasiswa, menjadikan aksi protes tanpa izin polisi atau memakai cat wajah dan masker sebagai aksi ilegal (Wyatt, 2012). Pemerintah di level pusat telah mengubah mandat operasionalnya secara khusus terkait pengawasan mencakup perbedaan pendapat politik. Hal tersebut membuat disahkannya undang-undang provokatif "Bill C-309" yang menegaskan bahwa mengecat wajah atau memakai masker selama aksi demonstrasi merupakan kejahatan dengan hukuman hingga lima tahun kurungan penjara. Mengecat wajah atau memakai masker telah lama digunakan sebagai sindiran untuk melindungi diri dari perlakuan buruk majikan atau menghindari pengawasan. Selain itu, "perkumpulan yang melanggar hukum" yang menyebabkan orang lain "mengalami ketakutan dengan alasan yang kuat" bahwa hal tersebut "akan mengganggu perdamaian" atau memprovokasi orang lain untuk melakukannya akan dihukum dengan kurungan penjara hingga sepuluh tahun (Jones, 2012).

Di Inggris, penentangan dalam parlemen oleh Partai Buruh terhadap agenda penghematan yang diusulkan pemerintah Koalisi telah menjadi berita hangat. Tetapi banyak mahasiswa, para peserta gerakan Okupasi, dan demonstrasi anti-pemotongan telah menjadi simbol militan sebagai

bentuk oposisi. Usulan pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah Undang-undang Perilaku Anti-sosial, Kejahatan dan Kebijakan. Meskipun tidak disetujui dan sekarang masih terhambat, undang-undang ini awalnya berusaha untuk melarang pertemuan spontan dan memberikan hukuman kepada siapa saja yang berusia 10 tahun ke atas yang "telah terlibat atau mengancam terlibat dalam perilaku yang dapat menyebabkan gangguan bagi orang lain" (Monbiot, 2014). Namun kebebasan berkumpul dan kebebasan sipil lainnya masih terus dibatasi oleh Undang-undang Ketertiban Umum dan berbagai undang-undang anti-terorisme diperpanjang untuk memantau berbagai aksi protes.

Spanyol dan Yunani telah menjadi pusat protes krisis dan anti-penghematan di Eropa. Di Yunani, rentetan protes, aksi mogok, okupasi, dan pertempuran jalanan terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak dalam pengambilan keputusan parlemen. Sebaliknya, tekanan dari Troika: Bank Sentral Eropa, Komisi Eropa, dan IMF telah menyebabkan paket penyesuaian struktural yang difokuskan pada penjualan aset publik, privatisasi layanan publik, undang-undang anti-tenaga kerja, dan subsidi baru bagi sektor bisnis. Pembatasan terbaru terkait demonstrasi meliputi peningkatan denda dan hukuman penjara untuk aksi yang dianggap menghambat akses ke gedung-gedung pemerintahan atau bangunan umum atau melakukan hal yang berdampak negatif bagi sektor bisnis (Spiliopoulou, 2013). Di Spanyol, perangkat undang-undang baru diberlakukan untuk mengantisipasi protes anti-penghematan — yang menentang pemotongan subsidi di sektor pendidikan, kesehatan, dan peraturan ketenaga-kerjaan yang ketat, dengan hukuman untuk protes jalanan tanpa ijin termasuk denda mencapai $800.000. Melakukan aksi demo di dekat gedung parlemen atau area yang tidak sah lainnya dapat dikenakan hukuman kurungan penjara sampai dua tahun (O'Leary dan Gonzalez, 2013).

Pembatasan-pembatasan baru pada setiap aksi protes yang diadopsi oleh negara-negara inti kapitalis ini sesuai dengan pandangan neoliberal bahwa masyarakat yang bebas berporos pada kebebasan pasar. Hal ini, mungkin memerlukan beberapa pembatasan terhadap kegiatan oposisional yang menyalahi aktivitas pasar dan pelanggaran hak milik pribadi, sama seperti halnya perdebatan neoliberal pada tahun 1970an yang menganggap bahwa

pemerintahan Barat saat itu tengah menderita akibat 'demokrasi yang kebablasan'. Seymour (2013) mencatat, "Bagi negara yang ingin melakukan bisnisnya [dalam pembelaan untuk pasar], otoritasnya harus dipulihkan: oleh karena itu, harus menonjolkan arti penting 'hukum dan peraturan'."

Dalam teori dan prakteknya jika lajur anti-demokrasi bergerak melalui neoliberalisme bukanlah hal baru, karena masih memanfaatkan tekanan. Ketiadaan dua keadaan genting adalah jajaran yang terdiri kekuatan sosial dan pelaksanaan kekuasaan negara yang sama. Kapasitas koersif negara dan pengawasan domestik sekarang memiliki metode penyelesaian yang tidak tertandingi untuk memantau dan mengganggu oposisi demokratik. Fase penghematan permanen ini bahkan telah mengucilkan oposisi politik terorganisir yang menentang penghematan, dalam wacana ideologi neoliberal dan mandat operasional yang diberikan kepada cabang-cabang koersif negara, dan memperlakukan mereka yang melawan pasar sebagai musuh negara. Kecenderungan otoriter dari neoliberalisme sebagai praktik negara yang sebenarnya, terlepas dari apa pun mandat libertarian yang diserukan oleh para pemikirnya, telah bermutasi menjadi 'pendisiplinan demokrasi'. Substansi demokrasi sebagai proses perjuangan kelas-kelas dan kelompok-kelompok sosial terhadap tatanan sosial ekonomi yang terus berganti, dan pengembangan kapasitas kewarga-negaraan, telah dihancurkan. Yang menjadi soal adalah ketika pemerintahan dijalankan oleh rezim politik sayap kanan, 'pemerintahan teknis', atau partai sosial demokratik dari sayap kiri menerima penghematan untuk sebuah kesempatan menduduki kursi kekuasaan negara. Yang tersisa dari demokrasi adalah legitimasi prosedural yang disediakan oleh pemilu yang menawarkan pilihan di antara kelompok-kelompok elit politik yang kemudian membela kepentingan pasar dan mengelola negara menjadi semakin koersif. Hal ini, tentu saja, adalah langkah mengerikan menuju sebuah dunia dari rezim politik yang sudah tua dan penyebaran kekuasaan negara yang dilakukan secara sewenang-wenang.

IV. Akhir dari Kapitalisme Demokratis?

Klaim-klaim demokratis dari para neoliberal untuk pembenaran moral atas kebebasan, sejak Hayek, dibangun di atas subordinasi individu ke dalam kekuasaan pasar yang diterapkan melalui pelaksanaan legitimasi dengan pemaksaan negara dalam mempertahankan kontrak dan properti. Dalam praktiknya sebagai lawan dari abstraksi individualisme radikal, neoliberalisme memperkuat ketimpangan kelas sosial dan diferensiasi ketergantungan pada pasar dengan mengorbankan proses-proses egalitarian dan pengembangan demokrasi. Proyek neoliberal memang saling terkait dengan 'de-demokratisasi' dan langkah-langkah 'otoriter' yang tidak mungkin dipisahkan praktiknya. Wendy Brown (2006, halaman 710), secara jelas menulis bagaimana kenaikan luar biasa harga pasar neoliberalisme telah menyatu dengan rasa segan tradisional yang berakar dari konservatisme terkait kekuasaan koersif negara untuk menghasilkan politik anti-demokrasi:

> "...neokonservatisme menaikkan harga kekuasaan dan statisme, dan ketika energi tersebut digabungkan dengan moralisme etos-etos pasar, dan ketika publik dibentuk oleh campuran dari energi-energi tersebut dengan rasionalitas, hasilnya adalah sebuah budaya politik anti-demokrasi yang ganas. Ini adalah budaya yang tidak sudi membatasi statisme dan kekuasaan korporasi, dan di atas semua itu, budaya ini membenci dan bahkan menyerang prinsip-prinsip klasik dan persyaratan konstitusional demokrasi."

Ini merupakan apa yang kami sebut sebagai 'pendisiplinan demokrasi' — bentuk politik dari 'penghematan permanen'.

Sebagian yang tidak membuat perhitungan politik, terutama di kalangan kaum kiri, tidak menyadari bahwa mendiskreditkan neoliberalisme akibat krisis dan menguatkan negara tidak akan merevitalisasi kembali proyek 'kapitalisme demokratis'. Namun partai-partai sosial demokratis telah memberikan sedikit — mungkin ada yang mengatakan beberapa — penyimpangan dalam pemerintahan alternatif selama krisis. Partai-partai ini terbukti mampu merekonstruksi matriks kebijakan neoliberal kare-

na mereka ikut membantu menyusunnya melalui politik Jalan Ketiga di tahun 1990an. Ini adalah kemunduran yang luar biasa tesis kapitalisme demokratis tentang organisasi politik dan kemajuan sosial. Tesis tersebut berasal dari kontroversi revisionis dalam Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) di awal abad ke-20, dimana pernyataan yang cukup jelas tentang itu diberikan oleh Rudolf Hilferding. Dalam kongres SPD pada tahun 1927, Hilferding berpendapat: "Kapitalisme terorganisir adalah bergantinya prinsip kapitalis yang didasarkan pada persaingan bebas dengan prinsip sosialis yang didasarkan pada produksi yang direncanakan. Masalah yang kemudian dihadapi generasi kita: dengan bantuan negara, diarahkan oleh kesadaran sosial, untuk mengubah ekonomi yang terorganisir dan dipimpin oleh kapitalis menjadi ekonomi yang diarahkan oleh negara demokratis" (dikutip dalam Harrington, 2011, halaman 57).

Pendapat Hilferding kemudian diikuti oleh beragam peristiwa seperti trauma-trauma depresi, fasisme, dan perang. Pada awal 1980an, saat kebijakan neoliberal berjuang untuk mencapai hegemoni, Gosta Esping-Anderson (1985, halaman 3) mengemukakan program evolusi paralel untuk kapitalisme demokratis: "Gagasan sosial demokratis tentang 'jalan menuju kekuasaan' didasarkan pada asumsi bahwa pembentukan kelas di bawah kondisi parlemen yang demokratis dapat memberikan kekuatan dan solidaritas yang dibutuhkan untuk mengubah kapitalisme. Hal ini juga didasarkan pada asumsi lain: bahwa politik elektoral dan pencapaian-pencapaian reformis akan meningkatkan kemajuan sosial yang demokratis."

Rumusan Esping-Anderson dan Hilferding sama-sama penting bagi generasi pemikir sosial demokrat pada zamannya masing-masing. Namun teori sosial demokrat sekarang ini terkekang, seperti juga praktik partai-partai sosial demokratis. Colin Crouch, salah satu contohnya, telah berpindah dari visi programatik 'korporatisme kompetitif' sebagai penopang 'egalitarian' antar kelas-kelas di negara-negara inti kapitalisme, menuju pembacaan suram mengenai kondisi 'pasca-demokrasi'. Menentang penghematan neoliberal dan ketidakmungkinan untuk kembali kepada kebijakan ekonomi yang diarahkan oleh negara ("konfrontasi usang antara 'negara dan pasar'"), yang membuka celah untuk melakukan pembaruan terhadap institusi-institusi ekstra-pasar dengan menyediakan berbagai penghalang yang dimanfaatkan dari mobilisasi masyarakat sipil. Crouch mengidenti-

fikasi bahwa kemungkinannya bukan sebuah proyek demokratis, melainkan berupa "'akomodasi yang nyaman'. Hal ini sebagiannya dikarenakan kekuasaan korporat menjadikan bisnisnya sebagai alat pengikat mereka semua, dan juga sebagian lagi karena satu-satunya alternatif akan membuat masyarakat lebih melarat" (2011, halaman x).

Crouch tidaklah sendirian saat menyimpulkan bahwa proyek kapitalisme demokratis menemui jalan buntu, jika tidak bisa dibilang mati. Kasus yang paling ekstrim adalah, mungkin, Jurgen Habermas — ekstrim untuk ilusi menyihir Uni Eropa yang sekarang menjadi pengusung historis proyek ini. Menanggapi krisis yang mengungkap akhir dari alternatif nasional, Habermas (2012, halaman x) menyarankan, dalam perjalanannya menuju teori normatif saat analisis konkrit diperlukan, ia melihat bagaimana Uni Eropa sebagai perwujudan "transnasionalisasi demokrasi" yang membawa kemajuan "konstitusionalisasi dari otoritas politik" (halaman 18). Namun ketimbang memeriksa modalitas yang sesungguhnya di mana Uni Eropa bekerja (dan telah bekerja dan akan bekerja) melalui Bank Sentral Eropa, arahan pada deregulasi dan penghemetan dan liberalisasi pergerakan modal, Habermas membuat klaim yang mengejutkan bahwa prestasi utama dari Uni Eropa adalah menghambat kemajuan negara-negara anggotanya dan yang dibutuhkan saat ini, meski sedikit terlambat, adalah penutupan "kerugian demokratis" (halaman 12).

Hal tersebut merupakan idealisme liberal yang tidak dibatasi oleh ekonomi politik aktual dari kapitalisme kontemporer. Analisis yang jauh lebih hebat dapat ditemukan dalam tiga intervensi dari para pemikir utama tentang kebijakan yang terkait dengan upaya mendorong agar 'ekonomi diatur oleh pasar' (sebagaimana proyek kapitalisme demokratis juga secara umum sering disebut). Karya Miles Kahler dan David Lake, "*Politics in the New Hard Times: The Great Recession in Comparative Perspective*" (2013), mengumpulkan susunan perbandingan yang paling penting dari para ahli ekonomi politik yang dikenal sebagai pendukung gigih 'politik yang utama' dalam menentukan hasil ekonomi, terutama saat krisis yang kemudian mendiskreditkan paradigma kebijakan yang sedang berlaku saat itu. Dari titik awal ini, pertanyaan sentral yang diajukan sedikit mengejutkan – "krisis tanpa konsekuensi?" (halaman 20). Namun bukannya menyelidiki secara sistematis mengapa proyek 'kapitalisme demokratis' tidak mampu

mengembalikan pijakannya yang direbut neoliberalisme, bahwa "kurangnya perubahan politik sekarang ini berbeda dengan krisis masa lalu" yang sebagian besar dijelaskan oleh determinasi institusional yang sudah ada dalam ekonomi pasar yang diatur melalui iklan liberal "dalam menghadapi kendala-kendala internasional yang ketat" (halaman 21). Pertarungan lama politik masih terus berlanjut dan 'politik masih sangat penting', dengan beberapa perpecahan baru dalam politik yang membukakan jalan bagi kanan-jauh, namun pedoman lama neoliberal masih mengatur pembuatan kebijakan pemerintahan. Dalam analisis empiris yang luas dan teliti dalam buku "*Politics in the New Hard Times: The Great Recession in Comparative Perspective*", ada sebuah kehilangan yang aneh dan tidak terduga dari strategi sosial demokratis sebagai variabel yang perlu dihitung.

Pembacaan analitis yang elegan dari Nancy Bermeo dan Jonas Pontusson, "*Coping with Crisis: Government Reactions to the Great Recession*" (2012), lebih memfokuskan lensa perbandingan ekonomi politik untuk melihat dinamika pembuatan kebijakan ekonomi di negara-negara inti kapitalis ketika bereaksi terhadap kemerosotan ekonomi. Bermeo dan Pontusson menekankan bahwa ini merupakan politik yang dibentuk dalam pengaturan nasional yang menentukan respon terhadap krisis global. Ciri khas nasional dari pasar ekonomi liberal dan terkoordinasi yang dimaksud di sini, mementingkan upaya internasional dalam mengkoordinasikan manajemen menangani krisis, bahkan mampu memerintah Amerika Serikat dan otoritas ekonominya. Bermeo dan Pontusson menyimpulkan, "tanggapan pemerintah terhadap Resesi Besar telah dibingkai, dan memang dibuat, sebagai upaya penguatan pasar ... berbagai tanggapan dibentuk (kemudian dirancang) untuk menggaris-bawahi (dan menjamin) kontinuitas institusional" (halaman 26-27). Opsi-opsi kebijakan terbukti dibatasi dengan berbagai macam alasan — kendala sektor keuangan, memblokir devaluasi Euro, prevalensi ideologi neoliberal, kurangnya kapasitas untuk mengatur sektor industri dan keuangan, dan hal lainnya yang semuanya menunjuk pada keistimewaan kapasitas lembaga-lembaga negara. Bahkan ketika menyimpulkan bahwa tidak ada penyimpangan radikal yang terjadi dan bahwa kontinuitas kelembagaan lebih penting daripada politik dalam menentukan bentuk penghematan, kebuntuan proyek kapitalisme demokratis hanya diakui sebagai kegagalan politik alternatif: "koalisi baru dengan agenda redistribusi yang mungkin belum hadir, namun ketika ak-

hirnya muncul, mereka akan berhadapan dengan kekuatan mapan koalisi lintas-kelas yang yang menolak pemberian peran lebih bagi para aktivis dalam negara" (halaman 28).

Pengamatan terakhir ini, pada kenyataannya, merupakan titik awal bagi esai yang disunting oleh Armin Schäfer dan Wolfgang Streeck, "*Politics in the Age of Austerity*" (2013), karena krisis telah menunjukkan 'kekangan sosial demokratis'. Namun dalam teks-teks ini, perhatian terhadap kerapuhan liberal jauh lebih sedikit dibandingkan dengan keistimewaan ekonomi pasar yang terkoordinasi, karena memang, maksud dari analisis ini menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi cara untuk menembus politik penghematan negara. Sebaliknya, ada penerimaan bahwa neoliberalisme merupakan matriks kebijakan dan bentuk sosial dari negara yang berhasil bertahan dari krisis. "Tema utama dari politik domestik dan internasional dalam demokrasi kapitalis lanjut telah menjadi konsolidasi sektor keuangan publik melalui kebijakan jangka panjang dari penghematan" (halaman 17). Bukannya berangkat dari analisis mengenai awal yang ironis dari 'kepentingan politik' yang jatuh pada kesimpulan yang tidak penting sebagai respon terhadap berbagai krisis ekonomi, buku ini justru bergerak langsung untuk mengotopsi kapitalisme demokratis sebagai cara untuk memeriksa apa-apa saja yang menandai "penghematan negara demokratis" dengan "memperketat pengekangan fiskal untuk politik demokratis" (halaman 17).

Hal tersebut akhirnya tidak kredibel untuk meneruskan proyek perubahan sosial., demikian nasihat Schäfer dan Streeck, terutama jika sifat dasar mereka adalah redistributif. Penghematan negara merupakan parameter yang dapat merembes kepada pilihan-pilihan politik, dan partai-partai kiri-tengah mulai memahami hal ini. Beberapa esai menentang Habermas terkait prospek Uni Eropa untuk menghidupkan kembali kapitalisme demokratis. Namun jika melihat ketegasan idealisme filosofisnya untuk fokus pada real politik Uni Eropa, kesimpulannya adalah bahwa hal ini merupakan 'percobaan panjang' yang paling baik. Memang, ini adalah kenyataan suram yang mengharuskan penentangan terhadap partai demokrasi (termasuk sosial demokrat), kuatnya hegemoni kapitalisme keuangan, dan ikatan kendala fiskal yang telah jauh melampaui dampak

krisis sehingga menjegal seluruh rencana reflasi (reflationary plan).[4] Sebagai akibatnya, “pemerintah ... harus mengubah warganya menjadi kuasi-tenaga kerja yang disiplin yang rela menghasilkan pasar dengan tingkat pengembalian yang kompatibel dengan modal yang telah diinvestasikan di dalamnya, dengan memoderasi tuntutan mereka pada pertambahan ‘upah sosial’ sebagai warga negara namun terus meningkatkan produktivitas mereka” (halaman 20). Dalam bahan bacaan paling optimistik mengenai mempertahankan kekuasaan, jika tidak bisa disebut vitalitas, dalam kapitalisme demokrasi model Swedia, Sven Steinmo masih cukup blak-blakan memperingatkan bahwa “ada sedikit sekali dalam analisis ini yang akan membawa kita pada kesimpulan bahwa Swedia telah memiliki demokrasi politik yang sangat responsif ... Untuk mencoba membangun sistem sejenis itu ... di bagian lain Eropa menyerang penulis ini, setidaknya, karena ide tersebut berbahaya dan bodoh” (2013, halaman 103-04).

Contoh-contoh tersebut merupakan pembacaan konjungtur politik dengan sikap pesimis yang mengejutkan, bahkan jika melihat ambisi-ambisi dari kalangan kiri-tengah paska-Jalan Ketiga. Ada ekonomisme yang mencolok dari lembaga politik – berbagai demo dari kelas populer — untuk pemujaan-pemujaan ritualistik bahwa politik adalah segalanya. Lembaga oposisional di sini kemudian direduksi menjadi sarana adaptasi terhadap konfigurasi baru kekuasaan neoliberal dan praktik ekonomi. Ini adalah ratapan politik dan cacat analisis yang melahirkan sentimen ketidakmampuan ‘bahwa tidak ada alternatif’, hingga berakhir pada saran kebijakan praktis (yaitu, ‘lebih menguatkan negara, mengurangi pasar’) yang membuat tidak adanya terobosan melawan neoliberalisme. Hal ini kemudian memperkuat -meski secara tidak sengaja berbelok dari tujuan awalnya-kesimpulan teori demokrasi radikal sosialis bahwa tidak kebijakan yang dapat memperbaiki subordinasi kebebasan demokratis di bawah pasar — ‘ketidak-bebasan’ dari sekian banyak hal — yang muncul dari kebebasan mengakumulasi tanpa henti. Perpanjangan luar biasa dari praktik neoliberal atas nama penghematan mengingatkan pada observasi lama Marx (1976, halaman 990) mengenai demokrasi dan kekuasaan dalam masya-

4 Reflationary plan adalah sebuah kebijakan fiskal atau moneter yang dirancang untuk memperluas output sebuah negara dan membatasi dampak-dampak dari deflasi. Kebijakan reflasi ini bisa mencakup pengurangan pajak, perubahan suplai uang dan penurunan tingkat suku bunga (*editor*).

rakat kapitalis:

> "Karenanya kekuasaan kapitalis terhadap pekerja merupakan kekuasaan benda atas manusia, benda mati atas yang masih bernafas, produk terhadap produsennya. Komoditi-komoditi yang menjadi instrumen kekuasaan terhadap para pekerja (yaitu sebagai instrumen dari kekuasaan modal itu sendiri) hanyalah konsekuensi dari proses produksi; sebab mereka adalah produk-produknya. Dengan demikian pada tingkat produksi material, dari proses kehidupan di ranah sosial — untuk itulah proses produksi — kita menemukan situasi yang sama seperti yang kita temukan dalam agama di tingkat ideologis, yaitu pembalikan subjek ke objek dan begitu pula sebaliknya."

Jika perjuangan demokrasi hari ini masih memiliki makna, dan kita menentang semua bentuk kompromi politik dan analisis dengan hukum pasar yang ada, maka itu semua terletak dalam visi yang didasarkan pada komentar Marx. Ini adalah saat yang tepat untuk merebut kembali praktik pengembangan demokrasi untuk membuat lembaga populer yang mampu mengubah privatisasi total ruang publik dan kehidupan harian menjadi pembebasan diri dari praktik-praktik kekerasan pasar.***

Daftar Pustaka

Albo, G. and B. Evans (2010). From Rescue Strategies to Exit Strategies: The Struggle over Public Sector Austerity. In L. Panitch, G. Albo and V. Chibber, eds., *Socialist Register 2011: The Crisis This Time*. London: Merlin Press.

Albo, G., S. Gindin and L. Panitch (2010). *In and Out of Crisis: The Global Financial Meltdown and Left Alternatives*. Oakland: PM Press.

Arregui, E.V. and R. Roman (2013). *Continental Crucible: Big Business, Workers and Unions in the Transformation ofNorth America*. Nova Scotia: Fernwood Publishing.

Bermeo, N. and J. Pontusson, eds. (2012). *Coping with Crisis: Government Reactions to the Great Recession*. New York: Russell Sage Foundation.

Birch, K. and V. Mykhnenko, eds. (2010). *The Rise and Fall of Neoliberalism: The Collapse ofan Economic Order?* London: Zed Books.

Bortolotti, B. and V. Milella (2006). *Privatization in Western Europe Stylized Facts, Outcomes, and Open Issues*. Milano: Fondazione Eni Enrico Mattei, www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm.

Bova, E., R. Dippelsman, K. Rideout and A. Schaechter. (2013). *Another Look at Governments' Balance Sheets: The Role of Nonfinancial Assets*. IMF Working Papers, 13/95.

Brenner, N. and N. Theodore, eds. (2002). *Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America andWestern Europe*. Oxford: Blackwell.

Brown, W. (2006). *American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism and De-Democratization*. Political Theory, 34(6).

Brune, N., G. Garrett and B. Kogut. (2004). *The International Monetary Fund and the Global Spread of Privatization*. IMF Staff Papers, 51 (2).

Camp, L. (2012). 'Anti-Protest Law Passes Nearly Unanimously and is Signed by the President.' *Huffington Post*, March 14, http: //www.huffingtonpost.com/

Chorley, M. (2014). 'Banks Told Minister Royal Mail Could Have Been Worth £8.67 Billion.' *Mail Online*, February 25, http: //www.dailymail.co.uk/

Connell, R. (2010). 'Understanding Neoliberalism.' In Braedley, S., and M. Luxton, eds., *Neoliberalism and Everyday Life*. Montreal: McGill-Queen's University Press.

Crouch, C. (201 1). *The Strange Non-Death of Neoliberalism*. Cambridge: Polity.

Eick, V. and K. Briken, eds. (2014). *Urban (In)Security: Policing the Neoliberal Crisis*. Ottawa: Red Quill Books.

Engelhart, K. (2013). 'The Rise of the Far Right in Europe.' *Maclean's Magazine*, November 30 http: //www2.macleans.ca/2013/1 1 /30/rise-ofthe-far-right-in-europe/.

Esping-Andersen, G. (1985). *Politics Against Markets: The Social Democratic Road to Power*. Princeton: Princeton University Press.

European Federation of Public Service Unions, Canadian Union of Public Employees, National Union of Public and General Employees and Public Service Alliance of Canada. (2010). *A Critical Assessment of the Proposed Comprehensive Economic and Trade Agreement Between the European Union and Canada*. http://cupe.ca/updir/Critical_Assessment_EU_Can_Deal.doc.

Farrant, A., E. McPhail and S. Berger (2012). Preventing the "Abuses" of Democracy: Hayek, the "Military Usurper" and Transitional Dictatorship in Chile? American Journal of Economics and Sociology, 71 (3).

Friedman, M. (2002). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chi-

cago Press.

Futrelle, D. (2012). 'Chicago's Parking Meter Debacle.' *Time*, May 11, http://business.time.com/2012/05/11/

Habermas, J. (2012). *The Crisis of the European Union: A Response*. Cambridge: Polity.

Harrington, M. (201 1 /1989). *Socialism: Past and Future*. New York: Arcade.

Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.

Hayek, F.A. (1976/1944). *The Road to Serfdom*. Chicago: University of Chicago Press.

Higgins, A. (2013,). 'Right Wing's Surge in Europe Has the Establishment Rattled.' *New York Times*, November 8, http: //www.nytimes.com/2013/1 1 /09/

IFC (International Finance Corporation). (2014). *Handshake: IFC's Quarterly Journal on Public-Private Partnerships*.' Washington: World Bank Group.

Jones, K. (2013). *Police State Canada: Harper Government Enacts Law Threatening Masked Protestors with Ten-Year Jail Terms*. Global Research Centre, June 24, http://www.globalresearch.ca/

Kahler, M and D. Lake, eds. (2013). *Politics in the New Hard Times*. Ithaca: Cornell University Press.

Kelsey, J. (2011). *No Ordinary Deal: Un-Masking the Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement*. London: Allen and Unwin.

Kozolanka, K. (2007). *The Power of Persuasion: The Politics of the New Right in Ontario. Montreal*: Black Rose Books.

Köthenbürger,JM., H. SinnJ andJ J.Whalley, eds. (2006) *Privatization Experiences in the European Union*. Cambridge: MIT Press.

KPMG International. (2009). *Tough Choices Ahead: The Future of the Public Sector, Ottawa*: KPMG, at www.kpmg.com.

LeBaron, G. and P. Dauvergne. (2014). *A Threat to Growth? Environmental Activism in the Wake of the 2008 Financial Crisis*. Sheffield Political Economy Research Institute, http://speri.dept.shef.ac.uk/2014/01 /07/

Lennerd, N. (2012). 'Inside that New Anti-Occupy Bill.' *Slate*, http://www.salon.com/2012/03/07/

Marx, K. (1976/1867). *Capital, Volume 1*. London: Penguin.

Milonakis, D. and B. Fine. (2009). *From Political Economy to Economics: Method, the Social and Historical in the Evolution of Economic Theory*. New York: Routledge.

Mirowski, P. and D. Plehwe, eds. (2009). *The Road to Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective*. Cambridge: Harvard University Press.

Monbiot, G. (2014). 'At Last, A Law to Stop Almost Anyone From Doing Almost Anything.' *The Guardian*, January 6, http: //www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/06

OECD (2012). *Recommendation of the Council on Principles for the Public Governance of Public-Private Partnerships. Paris*: OECD.

OECD (2008). *Privatisation in the 21st Century: Recent Experiences of OECD Countries on Good Practices. Paris*: OECD.

O'Leary, E. and A. Gonzalez. (2013). Spain's Anti-Protest Bill Criticized as Anti-Democratic. *Reuters*, November 29, http: //www.reuters.com/article/2013/1 1 /29/

Ortiz, I., S. Burke., M. Berrada and H. Cortes. (2013). World Protests 2006-2013. Columbia University: Initiative for Policy Dialogue.

Palmer, J. (2013). The Rise of Far Right Parties Across Europe is a Chilling Echo of the 1930s. *The Guardian*, November 15, http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/15/

Panitch, L., G. Albo, V. Chibber, eds., (2010). The Crisis This Time: Socialist Register 2011. London: Merlin Press.

Panitch, L., G. Albo, V. Chibber, eds., (2011). The Left and the Crisis: Socialist Register 2012. London: Merlin Press.

Panitch, L. and S. Gindin. (2012). The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire. London: Verso.

Peck, J. (2008). Remaking Laissez-Faire. Progress in Human Geography, 32(1).

——— (2010). Constructions of Neoliberal Reason. Oxford: Oxford University Press.

Privatization Barometer (2012). The PB Report 2012: A Surprisingly Good Year. Milano: Fondazione Eni Enrico Mattei, http: //www.privatizationbarometer.net/

Schafer, A. and W. Streeck, eds. (2013). Politics in the Age ofAusterity. Cambridge: Polity.

Seymour, R. (2013). From Quebec to Spain Anti-Protest Laws are Threatening True Democracy. The Guardian, November 25, http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/25/

Shalla, V. and W. Clement, eds. (2007). Work In Tumultuous Times: Critical Perspectives. Montreal: McGill-Queens University Press.

Shields, J. and B. Evans. (1998) Shrinking the State: Globalization and

Public Administration. Halifax: Fernwood Publishing.

Spiliopoulou, M. (2013). Greek Anti-Austerity Rally Goes on Despite Government Restrictions on Protest, June 7 http: //news.xinhuanet.com/

Standing, Guy. Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. London: MacMillan, 1999.

Stedman Jones, D. (2013). Masters ofthe Universe: Hayek, Friedman and the Birth of Neoliberal Politics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Steinmo, S. (2013). Governing as an Engineering Problem: The Political Economy of Swedish Success. In Schafer, A., and Streeck, W. (eds.), Politics in the Age of Austerity, Cambridge, Polity.

Streeck, W. and K. Thelen, eds. (2005). Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies. Oxford: Oxford University Press.

The Economist. (2014). Setting Out the Store, January 11, http://www.economist.com/news/briefing/

TNI (Transnational Institute) (2013). Privatizing Europe: Using the Crisis to Entrench Neoliberalism. Amsterdam: TNI.

Turner, R. (2007). The "Rebirth of Liberalism": The Origins of Neoliberal Ideology. Journal of Political Ideologies, 12.

Van Waeyenberge, E. (2010). Tightening the Web: The World Bank and Enforced Policy Reform. In Birch, K. and V. Mykhnenko, eds., The Rise and Fall of Neoliberalism: The Collapse ofan Economic Order? London: Zed Books.

Vosko, L., ed. (2006). Precarious Employment: Understanding Labour Market Insecurity in Canada. Montreal: McGill-Queen's University Press.

Wood, L.J. (2014). Crisis and Control: The Militarization of Protest Polic-

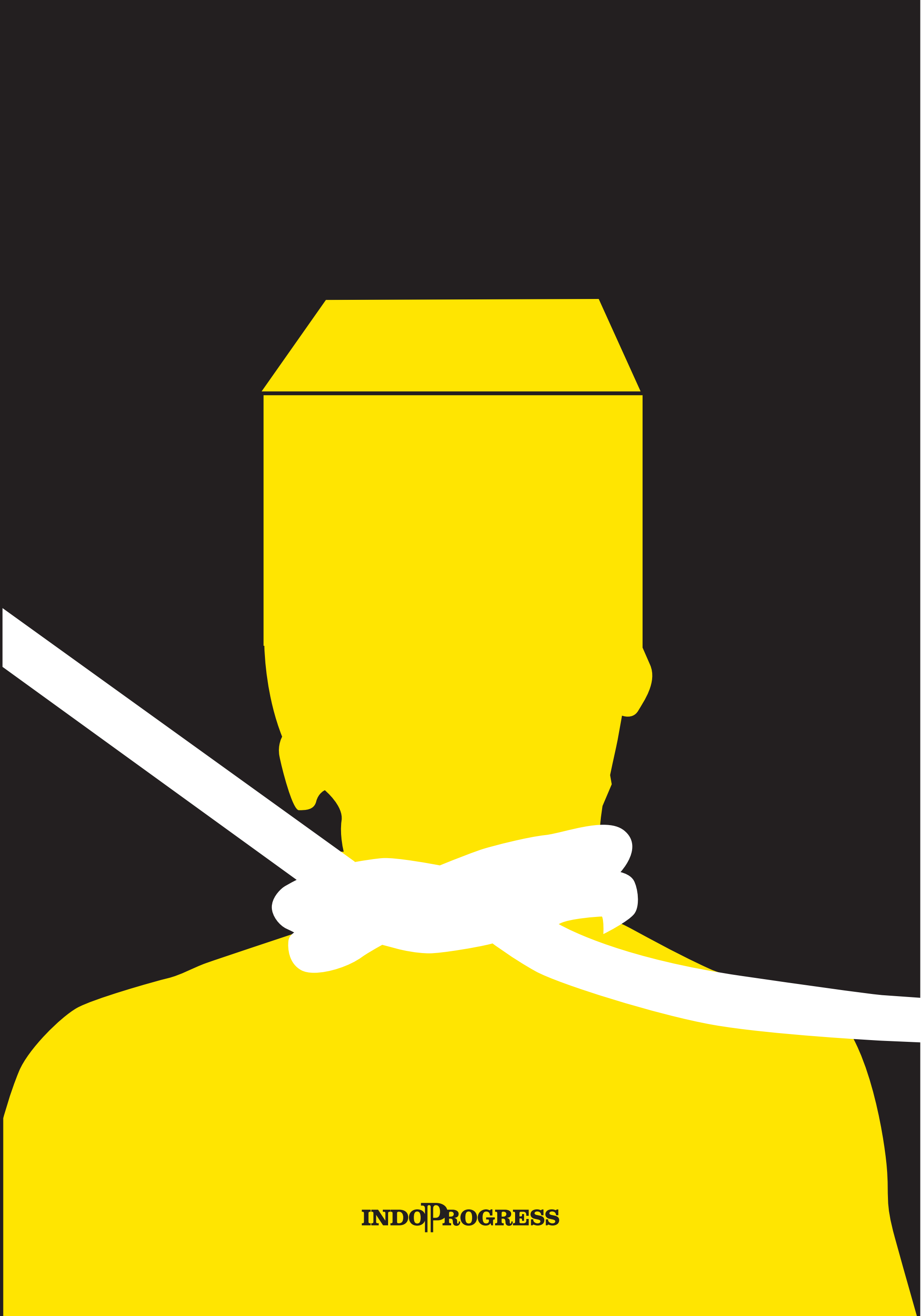
ing. Toronto: Between the Lines.

Wyatt, N. (2012). Quebec Students Cheer UN Condemnation of Controversial Anti-Protest Law. National Post, June 19 http: //news.nationalpost.com/2012/06/19/

Biodata Penulis:

Greg Albo adalah profesor Ilmu Politik di York University, Toronto, Kanada.

Carlo Fanelli adalah visiting professor di Departemen Politik dan Administrasi Publik, Ryerson University, Toronto, Kanada.


INDOPROGRESS